

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL, DAN
DANA PERIMBANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA JAWA TIMUR TAHUN
PERIODE 2017-2021**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Silvia Rahmadina

Nomor Mahasiswa: 20312179

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL, DAN
DANA PERIMBANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA JAWA TIMUR TAHUN
PERIODE 2017-2021**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Universitas Islam Indonesia (UII)

Oleh:

Nama: Silvia Rahmadina

Nomor Mahasiswa: 20312179

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL, DAN
DANA PERIMBANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA JAWA TIMUR TAHUN
PERIODE 2017-2021**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Nama: Silvia Rahmadina

Nomor Mahasiswa: 20312179

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal, 23 Februari 2024

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Erna Hidayah', written in a cursive style.

(Erna Hidayah, Dra., M.Si., Ak., CA.)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

Bapak tercinta:

Nurdin, S.E

Mama tercinta:

Robiyanti. AM

Adik-adik tercinta:

Muhammad Naufal. M & Difa Firas Fatih

Dan seluruh pihak yang selalu memberikan dukungan selama ini

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamiin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, ridho, rizki dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Dana Perimbangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun Periode 2017-2021”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Program Sarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Universitas Islam Indonesia (UII).

Selama studi dan dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada Hamba-hamba-Nya dengan Ridha dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis tercinta Bapak Nurdin, S.E dan Ibu Robiyanti. AM yang menjadi pilar kekuatan penulis selama perjalanan hidup ini. Terimakasih sebanyak-banyaknya berkat doa, dukungan dan kasih sayangnya yang tidak pernah padam.

3. Adik-adik penulis tercinta nan terhebat Muhammad Naufal. M dan Difa Firas Fatih yang menjadi penyemangat hidup penulis.
4. Ibu Erna Hidayah, Dra., M.Si., Ak., CA., selaku dosen pembimbing skripsi yang sangat sabar. Terimakasih banyak telah bersedia meluangkan waktu, memberikan arahan, saran dan kritikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Fathul Wahid, S.T., M., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Prof. Rifqi Muhammad, S.E., M.Sc., Ph.D., SAS selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
7. Seluruh dosen dan staff Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan membantu dalam menjalani masa perkuliahan.
8. Sahabatku Dara Beauty Tri Ekperi dan Shinta Mutia Dewi yang selalu menyemangati, mendoakan penulis, dan menemani penulis dalam kondisi apapun.
9. Seluruh teman-teman penulis yang telah berpartisipasi dalam memberikan dukungan dan membantu penulis dari awal perkuliahan hingga akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Yogyakarta, 23 Februari 2024

Penyusun



(Silvia Rahmadina)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain,kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Februari 2024

Penyusun

A handwritten signature in black ink is written over a QR code and a portion of a pink 10,000 Rupiah Indonesian banknote. The QR code is square and pink, and the banknote features the Garuda Pancasila emblem and the number '10000'.

(Silvia Rahmadina)

ABSTRAK

Kinerja keuangan adalah ukuran yang digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam menjalankan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan optimal sehingga dapat mempertahankan layanan yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bukti empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Periode 2017-2021. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang berjumlah 31 kabupaten/kota. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* terpilih sampel 130. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis sebagai teknik analisis data. Hasil pada penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan, Belanja Modal dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan.

ABSTRACT

Financial performance is a measure used to ensure the region's ability to carry out financial implementation regulations properly and optimally so that it can maintain the desired services. This research aims to determine empirical evidence regarding the influence of Regional Original Income, Capital Expenditures, and Balancing Funds to Assess Regional Government Financial Performance for the 2017-2021 Period. The population used in this research is the Regency/City Regional Government in East Java, totaling 31 districts/cities. The sample selection in this study used a purposive sampling technique, selecting 130 samples. This study used descriptive statistical analysis, classical assumption testing, and hypothesis testing as data analysis techniques. The results of the research show that Regional Original Income has a positive and significant effect on Regional Government Financial Performance. Meanwhile, Capital Expenditures and Balancing Funds have a negative effect on Regional Government Financial Performance.

Keywords: *Original Regional Income, Capital Expenditure, Balancing Fund.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 <i>Agency Theory</i> (Teori Keagenan)	10

2.2	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	12
2.3	Pengukuran Kinerja Keuangan	15
2.4	Pendapatan Asli Daerah	17
2.5	Belanja Modal	23
2.6	Dana Perimbangan	25
2.7	Penelitian Terdahulu	30
2.8	Kerangka Penelitian	32
2.9	Hipotesis Penelitian	33
2.9.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	33
2.9.2	Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	35
2.9.3	Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	37
BAB III METODE PENELITIAN.....		39
3.1	Populasi dan Sampel.....	39
3.2	Sumber dan Metode Pengumpulan Data	39
3.3	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	40
3.3.1	Variabel Dependen (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah)	40
3.3.1.1	RasioEfektivitas	40

3.3.2 Variabel Independen	41
3.3.2.1 Pendapatan Asli Daerah	41
3.4 Hipotesis Operasional.....	44
3.5 Metode Analisis Data.....	45
3.5.1 Statistik deskriptif.....	45
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	45
3.5.2.1 Uji Normalitas.....	45
3.5.2.2 Uji Multikolinieritas	46
3.5.2.3 Uji Heteroskedasitas.....	47
3.5.3 Uji Autokorelasi.....	47
3.5.5 Analisis Koefisien Determinasi	48
3.6 Uji Hipotesis	49
3.6.1 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t).....	49
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Populasi dan Sampel.....	50
4.2 Data Pemerintah Daerah Jawa Timur	50
4.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	52
4.4 Variabel Independen	53
4.4.1 Pendapatan Asli Daerah.....	53
4.4.2 Belanja Modal.....	54

4.4.3 Dana Perimbangan.....	55
4.5 Analisis Statistik Deskriptif.....	55
4.6 Uji Asumsi Klasik.....	57
4.6.1 Uji Normalitas	58
4.6.2 Uji Multikolineritas	60
4.6.3 Uji Heteroskedastisitas	61
4.7 Uji Autokorelasi.....	62
4.8 Regresi Linier Berganda	63
4.9 Analisis Koefisien Determinasi	65
4.10 Uji Hipotesis	66
4.10.1 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)	66
4.10.1.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	67
4.10.1.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	69
4.10.1.3 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Implikasi Hasil Penelitian.....	73

5.3 Keterbatasan Penelitian	74
5.4 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 4.1 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian.....	50
Tabel 4.2 Daftar Kabupaten/Kota Jawa Timur.....	51
Tabel 4.3 Hasil perhitungan dari rasio efektivitas.....	52
Tabel 4.4 Perhitungan dari pendapatan asli daerah.....	53
Tabel 4.5 Perhitungan dari belanja modal.....	54
Tabel 4.6 Perhitungan dari dana perimbangan.....	55
Tabel 4.7 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif.....	56
Tabel 4.8 Hasil Uji Analisis Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Sebelum Outlier.....	58
Tabel 4.9 Hasil Uji Analisis Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Sesudah Outlier.....	59
Tabel 4.10 Hasil Uji Analisis Multikolineritas.....	61
Tabel 4.11 Hasil Uji Analisis Autokorelasi.....	63
Tabel 4.12 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	64
Tabel 4.13 Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi.....	66
Tabel 4.14 Hasil Rekapitulasi Uji Hipotesis.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Peneliiian	33
Gambar 4.1 Hail Uji Normalitas P-P Plot	60
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian.....	79
Lampiran 2 Perhitungan Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Efektivitas	84
Lampiran 3 Data sebelum <i>Outlier</i>	89
Lampiran 4 Data sesudah <i>Outlier</i>	89
Lampiran 5 Hasil Uji Multikolinearitas	90
Lampiran 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	90
Lampiran 7 Hasil Uji Autokorelasi	90
Lampiran 8 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	91
Lampiran 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	91
Lampiran 10 Hasil Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)	91
Lampiran 11 Hasil Uji Statistik Deskriptif	92
Lampiran 12 Hasil Uji Normalitas P-P Plot.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah serangkaian proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara menciptakan keadaan yang lebih baik. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah tumbuhnya perekonomian yang menampilkan barang dan jasa yang didapatkan sebuah daerah. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi antara lain tersedianya sumber daya manusia dan alam, terbentuknya modal, serta kemajuan teknologi. Reformasi pemerintah yang diikuti dengan keterbukaan telah menjadi kewajiban di Indonesia. Hal ini mendorong terciptanya proses beralihnya sistem dekonsentrasi menjadi sistem desentralisasi yang dinyatakan dengan otonomi.

Penerapan Otonomi daerah menjadi perwujudan pergeseran sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Penerapan desentralisasi bertujuan untuk memindahkan wewenang pengelolaan sumber daya keuangan daerah ke pemerintah kabupaten dan kota, dengan asumsi bahwa mereka lebih memahami kebutuhan, potensi, dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah pusat (Wahyudin & Hastuti, 2020). Dengan diberlakukannya otonomi daerah, diharapkan semua daerah di Indonesia dapat menjalankan semua hal yang berkaitan dengan

pengembangan pemerintahan dengan berpedoman pada Pendapatan Asli Daerah yang dimilikinya (Nauw & Riharjo, 2021).

Otonomi daerah di Indonesia adalah proses delegasi pengurusan pemerintahan pusat pada pemda yang memiliki sifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah. Pemberlakuan otonomi daerah bertujuan agar daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua kegiatan pemerintah mulai dari pembiayaan hingga pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pelimpahan kewenangan telah diserahkan pada daerah otonomi, namun pemerintah pusat selalu memiliki kewajiban dalam mengontrol proses pertumbuhan dan kesejahteraan daerah yang nantinya mempunyai pengaruh terhadap perekonomian nasional. Daerah otonomi di Indonesia dipandang sebagai strategi untuk merespon tuntutan masyarakat lokal pada tiga isu utama yang berbagi kekuasaan, distribusi pendapatan, dan kemandirian sistem manajemen (Anggreni, Artini & gede, 2018).

Daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, harus memenuhi prinsip keadilan dengan memperoleh perimbangan keuangan yang adil antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu, daerah yang memiliki sumber daya alam yang kurang alami, akan menghadapi kesulitan dalam membiayai kegiatan pemerintahan yang kompleks karena jumlah dana yang diterima dari pemerintah pusat tidak mencukupi. Oleh karena itu, kinerja pemda dalam pengelolaan keuangan daerah harus mampu memenuhi semua kegiatan atau aktivitas daerah berdasarkan penggunaan sumber daya atau

kekayaan asli masing-masing daerah (Mahmudi, 2010). Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan (Maulina, Alkamal, & Fahira, 2021). Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 memberikan lebih banyak kewenangan pada daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, dan mengelola sumber-sumber penerimaan keuangan bagi daerah (Nauw & Riharjo, 2021). UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004 yang menjadi dasar penting dalam pelaksanaan otonomi daerah memberikan peluang yang lebih besar pada daerah untuk memaksimalkan potensi yang dimilikinya, baik yang berhubungan dengan sumber daya manusia, dana, ataupun sumber daya lainnya, seperti kekayaan daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan ataupun pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan dan tata kelola yang baik dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, dan pemerataan daerah. Penyelenggaraan pemerintah yang baik dapat dilihat dari kinerja keuangan.

Kinerja keuangan yang baik menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya dengan benar. Kinerja keuangan menjadi faktor terpenting dalam menunjukkan keefektifan serta keefisienan suatu kegiatan guna mencapai tujuannya. Jika suatu pemerintah atau daerah

mengelola keuangannya dengan baik, maka kinerja keuangan yang baik terindikasi. Namun, kinerja keuangan yang kurang baik dapat diindikasikan jika keuangan dikelola dengan tidak benar. Hal ini dapat menyebabkan daerah tersebut memiliki kinerja keuangan yang kurang baik atau bahkan menurun. Karena kinerja mengukur kesuksesan, penting bagi instansi untuk mencapai tujuan mereka (Ardelia, Wulandari, & Ernitawati, 2022).

Dalam pelaksanaan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengelola wilayahnya sendiri dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan pendapatan dari wilayah tersebut diharapkan dapat memperbaiki infrastruktur, sarana, dan prasarana, sehingga meningkatkan nilai investasi di daerah tersebut. Dengan adanya infrastruktur yang memadai dan investasi yang signifikan, diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat, sehingga dana perimbangan dari pemerintah pusat dapat dialokasikan untuk meningkatkan belanja modal daerah (Thalib, 2019). Selain itu, efisiensi penggunaan anggaran untuk menciptakan surplus anggaran juga dapat dimanfaatkan untuk periode berikutnya, sebagai anggaran awal dalam pengelolaan pemerintahan daerah (Djuniar & Zuraida, 2018).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur selalu melebihi target realisasi pendapatan daerah pada tahun 2018, 2019, dan 2020, meskipun berada pada kondisi pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, penerimaan PAD Pemprov Jawa Timur menurun 7% dari Rp 19.327.125.485.405 menjadi Rp 17.951.235.057.953. Selain itu, terjadi penurunan penerimaan PAD pada 16

Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Meskipun demikian, pencapaian realisasi belanja pada tahun 2020 lebih baik dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 32,28 triliun atau 93,41% dari penetapan belanja tahun 2020 sebesar Rp 34,56 triliun (Heryanti, Wahidahwati, & Suryono, 2019).

Dalam situasi resesi ekonomi, pemerintah seharusnya mengoptimalkan kegiatan belanja daerah karena belanja harusnya menjadi penopang roda perekonomian daerah. Namun, belanja modal yang tidak sebanding dengan belanja lain dapat mengakibatkan pengeluaran belanja modal kurang sehat. Menurut (Heryanti, Wahidahwati, & Suryono, 2019), belanja modal yang tidak seimbang dengan belanja lainnya dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal yang tidak sehat dapat mengakibatkan pengeluaran yang tidak efektif dan efisien, sehingga dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana faktor finansial mempengaruhi kinerja keuangan. Diharapkan dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik dalam memperoleh pendapatan dan melakukan belanja negara dapat meningkatkan pelayanan kepada publik dalam perwujudan desentralisasi.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor utama antara lain, penerimaan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, sumber daya manusia dan kondisi makro ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah penting untuk dilakukan. Beberapa penelitian

yang telah dilakukan secara umum hasilnya menyatakan bahwa informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan dinyatakan dalam rasio keuangan dapat menunjukkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai upaya pengukuran kinerja keuangan lebih dominan terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Informasi yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dapat dijadikan instrumen untuk mengukur kinerja keuangan daerah dengan melakukan Analisis rasio keuangan. Hasil dari perhitungan analisis rasio selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman pengukuran untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah suatu daerah dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan yang dilakukan Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya.

Dengan penelitian ini, akan membahas mengenai **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Periode 2017-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2017-2021?
2. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2017-2021?
3. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2017-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2017-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap tidak hanya berguna untuk menambah pengetahuan peneliti, namun juga dapat dimanfaatkan oleh peneliti lainnya di masa yang akan datang. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan sumber tertulis jika memang penelitian yang dilakukan memiliki kesamaan variabel yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Dana Perimbangan pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Dengan adanya penelitian mengenai penggunaan sistem pengukuran Kinerja Keuangan, diharapkan instansi pemerintah mampu mengelola keuangan daerahnya. Dengan begitu, instansi pemerintah dapat mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerahnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang melandasi penelitian dan menjadi dasar acuan teori dalam analisis penelitian ini (variabel dependen (Y), penelitian terdahulu, landasan teori, variabel independen (X), pengembangan hipotesis, dan kerangka penelitian).

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan mulai dari menentukan populasi dan sampel, sumber data, instrument data, dan metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil pengumpulan data, uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, analisis koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Menurut Jensen & Meckling (1976) relasi keagenan merujuk pada suatu perjanjian antara pihak prinsipal dan agen, yang melibatkan delegasi sejumlah kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Sebagai agen yang bertindak sebagai manajer, dan tanggung jawab moral untuk mengoptimalkan keuntungan bagi para pemilik (*Principal*). Namun, di sisi lain, agen juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri.

Pada dasarnya, teori keagenan telah diterapkan dalam organisasi sektor publik, terutama dalam pemerintahan daerah. Menurut (Mardiasmo, 2002), akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*Agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*Principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam sektor publik, negara demokrasi memiliki hubungan keagenan antara masyarakat dengan pemerintah atau antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenang

kepada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah juga harus mempertanggung jawabkan tugasnya terhadap pemerintah pusat. Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Hubungan keagenan pada sektor publik, dapat dilihat dalam penyusunan anggaran. Pada pemerintah daerah khususnya pada provinsi, provinsi bertugas untuk menyusun anggaran dan kemudian mengirimkannya ke pusat setelah mendapatkan pengesahan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah kemudian menjalankan kegiatan berdasarkan anggaran tersebut. Akhirnya, pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan realisasi anggaran kepada pemerintah pusat.

Namun terdapat banyak masalah yang sering muncul dalam teori keagenan, salah satunya adalah asimetri informasi (*Information Asymmetry*). Asimetri informasi adalah keadaan di mana pemerintah (Agen) mengetahui lebih banyak tentang kondisi internal perusahaan/instansi daripada masyarakat (*Principal*). Pemerintah daerah bertanggung jawab atas APBD atau pengelolaan keuangannya dengan memberikan hasil keuangan kepada publik, yang kemudian digunakan oleh publik untuk mengukur keberhasilan daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan termasuk mengelola keuangan daerah. Pemerintah tidak dapat menyiapkan laporan keuangan secara lengkap serta konsisten lantaran suatu motif

tertentu sehingga terjadi asimetri informasi. Adanya asimetri informasi ini, agen dapat melakukan kecurangan terhadap prinsipal untuk mencegah hal tersebut, maka akuntabilitas kinerja pemerintah perlu dilakukan penilaian secara berkala sebagai salah satu cara untuk mengontrol dan memastikan penyelenggaraan keuangan daerah dilaksanakan dengan penuh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, teori keagenan berkaitan dengan pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) dan harus menetapkan strategi tertentu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen. Kinerja tersebut dapat dilihat dari penggunaan pendapatan asli daerah, belanja modal dan dana perimbangan.

2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang terlihat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah secara masing-masing dapat digunakan sebagai instrumen untuk membuat peraturan dalam kemajuan wilayah. Laporan pertanggungjawaban terkait uang teritorial harus diberikan setiap tahun. Kinerja keuangan daerah dapat diukur dan dievaluasi dengan kapasitas pemerintah terdekat untuk menyelidiki kemungkinan kabupaten mereka

dengan titik bahwa mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan gaji teritorial setiap tahunnya. Kinerja keuangan daerah dalam hal ini diukur dengan memanfaatkan proporsi pembangunan upah teritorial.

Kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan tingkat pencapaian suatu pekerjaan dalam jangkauan dana teritorial seperti pendapatan dan konsumsi teritorial. Kerangka anggaran yang diputuskan melalui suatu pengaturan atau peraturan perundang-undangan untuk satu periode anggaran dapat digunakan untuk memperkirakan pencapaian tersebut. Bentuk perkiraan pelaksanaannya adalah dalam bentuk proporsi terkait uang yang dibentuk dari kerangka laporan pertanggungjawaban daerah dalam bentuk perhitungan APBD. Pemerintah daerah wajib membuat laporan pertanggungjawaban rekening teritorial untuk dievaluasi apakah pemerintah teritorial telah berhasil melaksanakan kewajibannya dengan baik atau yang lainnya. Salah satu alat untuk menganalisis pelaksanaan daerah dalam mengawasi rekening teritorialnya adalah dengan menganalisis proporsi anggaran terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Kinerja keuangan adalah ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam menjalankan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan optimal untuk mempertahankan layanan yang diinginkan. Penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi dalam daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi isu penting bagi pemerintah daerah dan pihak luar. Salah satu cara untuk memperluas proporsi kebebasan di

pemerintah terdekat adalah dengan eksekusi terkait uang pemerintah lingkungan, kinerja keuangan dapat dinilai melalui laporan keuangan (Fernandes & Putri, 2022).

Menurut (Kieso et al., 2002), laporan keuangan merupakan sarana pengomunikasi informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar korporasi. Laporan ini melampirkan sejarah perusahaan yang dikuantitatifkan dalam nilai moneter. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lian serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

(Mardiasmo, 2002) menjelaskan bahwa tujuan umum laporan bagi organisasi pemerintah adalah:

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta berbagai bukti pertanggungjawaban (*Accountability*) dan pengelolaan (*Stewardship*).
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Tujuan tersebut mencakup:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi. Hubungan antar pihak terkait sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan.

2.3 Pengukuran Kinerja Keuangan

Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang sekarang berubah menjadi Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menyatakan bahwa tolak ukur kinerja merupakan komponen lain yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja.

(Noordiatmoko, 2019) Menjelaskan kinerja keuangan sebagai kondisi keuangan yang mencerminkan pelaksanaan aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar. Setiap bisnis melakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui seberapa baik manajemennya. Pengukuran kinerja pemerintah dilakukan untuk Menapii tiga tujuan, yaitu:

1. Meningkatkan kinerja pemerintah,

2. Membantu pembuatan keputusan dan alokasi sumber daya, dan,
3. Meningkatkan pertanggungjawaban publik, dan meningkatkan komunikasi kelembagaan.

Adapun tujuan dari pengukuran kinerja Menurut (Suliantoro, 2020), meliputi:

1. *Look Back*, memungkinkan organisasi untuk melihat ke belakang dan melakukan kegiatan di masa lalu.
2. *Look Ahead*, yaitu hasil pengukuran kinerja di masa lalu dapat menjadi dasar penyusunan atau penentuan target kinerja di masa datang.
3. *Compensate*, dimaknai bahwa pengukuran kinerja memungkinkan pelaksanaan evaluasi bagi individu untuk selanjutnya dapat diberikan kompensasi sesuai dengan kinerja yang dicapai.
4. *Motivate*, berarti hasil pengukuran kinerja di masa lalu dapat dijadikan sebagai motivasi dalam penyusunan atau penentuan kinerja individu di masa yang akan datang.
5. *Roll Up*, berarti pengukuran kinerja dapat memungkinkan organisasi untuk memetakan dan mengkompilasi kinerja di level unit terendah ke level tertinggi.
6. *Cascade Down*, bahwa pengukuran kinerja memungkinkan organisasi memetakan dan melakukan derivasi kinerja di level unit tertinggi ke level unit terendah.

7. *Compare*, adalah pengukuran kinerja yang memungkinkan organisasi untuk membandingkan unitnya.

2.4 Pendapatan Asli Daerah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengartikan pendapatan sebagai segala penerimaan yang diterima oleh Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang meningkatkan kekayaan bersih dalam tahun anggaran yang bersangkutan, menjadi hak pemerintah, dan tidak memerlukan pengembalian kepada pemerintah. Secara umum, pendapatan dapat dipahami sebagai hak pemerintah daerah yang meningkatkan kekayaan bersih sebagai hasil dari transaksi masa lalu. Dalam UU 33/2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai penerimaan yang diperoleh oleh daerah dan dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku dan peraturan perundang-undangan. PAD adalah indikator kemandirian otonomi daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan tambahan (Hanif, 2022). Semakin tinggi PAD, semakin besar kemandirian wilayah dalam mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan pembangunan. Kontribusi yang signifikan dari pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah seharusnya menjadi peluang yang optimal untuk menghidupkan kembali perekonomian wilayah. Menurut UU 28/2009, PAD adalah sumber keuangan daerah yang diperoleh dari wilayah daerah itu sendiri, yaitu:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kewajiban pembayaran kepada Pemerintah Daerah yang harus dipenuhi oleh individu atau perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, tanpa menerima imbalan langsung, dan digunakan untuk mempromosikan kemakmuran rakyat di wilayah tersebut (sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah). Seperti halnya pajak pada umumnya, pajak daerah memiliki dua peran utama; Sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, dan sebagai alat pengaturan.

Subjek Pajak merujuk kepada individu atau entitas yang dapat dikenakan kewajiban pajak, sementara Wajib Pajak mencakup individu atau entitas yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Masa Pajak adalah periode selama satu bulan kalender atau durasi lain yang diatur oleh Peraturan Kepala Daerah, dengan batasan maksimal tiga bulan kalender, yang digunakan sebagai dasar perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang harus disetor oleh Wajib Pajak. Tahun Pajak adalah periode satu tahun kalender, kecuali jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun kalender. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,

pengelolaan pajak dilakukan oleh provinsi dan kabupaten/kota.

Jenis Pajak provinsi meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 4. Pajak Air Permukaan; dan
 5. Pajak Rokok.
2. Retribusi Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang secara khusus disediakan atau diberikan kepada Individu atau Entitas. Jasa yang dimaksud mencakup kegiatan pemerintah daerah yang menghasilkan barang, fasilitas, atau manfaat lain yang dapat dinikmati oleh Individu atau Entitas. Pemerintah pusat kemudian mengeluarkan regulasi baru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan adanya undang-undang ini, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dicabut. Ciri-ciri retribusi daerah:

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah,
2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis,

3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk, dan,
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan mengenyam jasa-jasa yang disediakan negara.

Retribusi daerah digolongkan dalam tiga kelompok retribusi, yang terdiri dari:

- a. Retribusi jasa umum,
- b. Retribusi jasa khusus, dan
- c. Retribusi perizinan tertentu.

3. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, "hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan" mencakup antara lain; bagian laba yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pendapatan daerah yang berasal dari pengelolaan aset milik daerah yang dipisahkan. Jenis-jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meliputi objek pendapatan, yaitu:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya Yang Sah

Pendapatan ini merupakan sumber pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah maupun dana perimbangan. Komponen pendapatan ini terdiri dari pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah berasal dari pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang diberikan tanpa ikatan atau kewajiban pengembalian kepada daerah. Saat menerima hibah, daerah harus menjaga agar tidak terlibat dalam ikatan politis yang dapat memengaruhi kebijakan daerah. Terutama dalam kasus hibah dari luar negeri, pemberian hibah ini diatur dalam perjanjian hibah yang ditandatangani oleh Pemerintah Pusat dan lembaga atau negara pemberi hibah. Setelah itu, Pemerintah Pusat meneruskan hibah tersebut kepada Pemerintah Daerah. Adapun dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi:

- 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,

2. Jasa giro,
3. Pendapatan bunga,
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber utama pembiayaan daerah dan pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber-sumber daya yang dimilikinya dalam rangka menjalankan wewenang fiskal. Tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak dan retribusi daerah akan memberikan penilaian positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan kemandirian suatu daerah dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Menurut Sihite (2010), Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, menunjukkan bahwa meningkatnya Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat dalam membayar pajak dan pungutan lainnya.

2.5 Belanja Modal

Dalam PMK No. 102 Tahun 2018 yang berkaitan dengan Klasifikasi Anggaran, "Belanja modal adalah pengeluaran yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah aset tetap atau aset lainnya dengan periode penggunaan melebihi satu tahun dalam anggaran, sesuai dengan pedoman pendanaan aset yang telah ditetapkan oleh pemerintah". Aset tetap ini digunakan dalam kegiatan sehari-hari oleh unit kerja yang melayani masyarakat dan tercatat dalam registrasi aset Kementerian atau Lembaga, bukan untuk tujuan penjualan.

1. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, belanja modal diklasifikasikan sebagai berikut (Mardiasmo, 2006):
2. Pengeluaran tersebut menghasilkan perolehan aset tetap atau aset lainnya yang meningkatkan masa pakai, manfaat, dan kapasitasnya.
3. Pengeluaran tersebut melebihi ambang batas minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
4. Perolehan aset tetap tersebut disengaja untuk digunakan dalam operasional kegiatan sehari-hari, bukan untuk tujuan penjualan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal dibagi menjadi beberapa jenis belanja yaitu antara lain:

1. Belanja Modal Tanah, merupakan seluruh pengeluaran untuk perolehan hak atas tanah.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, merupakan pengeluaran untuk pembelian alat-alat dan mesin yang nantinya digunakan untuk kegiatan.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, merupakan seluruh biaya untuk pembangunan gedung dan bangunan.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, merupakan seluruh pembangunan untuk pembangunan sarana dan prasarana jaringan pengairan, jaringan instalasi distribusi listrik dan jaringan telekomunikasi dan jaringan lain yang berfungsi sebagai sarana dan prasarana fisik distribusi instalasi.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya, seluruh biaya dalam rangka pengadaan/pembangunan belanja fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan dan irigasi) dan belanja modal non fisik. Contoh belanja modal fisik lainnya antara lain kontrak sewa beli, pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, pembelian hewan ternak dan pengadaan buku-buku. Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila:
 - a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.

- b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual atau dibagikan.

2.6 Dana Perimbangan

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 19, tentang Hubungan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan Dana Perimbangan sebagai sumber dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai keperluan Daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya Dana Perimbangan, diharapkan kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berkurang, sehingga tidak ada daerah yang tertinggal. Selain itu, alokasi Dana Perimbangan juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Tujuan dari pemberian Dana Perimbangan oleh pemerintah pusat kepada daerah adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bantuan keuangan kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan kewenangan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan layanan kepada masyarakat.

2. Mengurangi ketimpangan dalam sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah.
3. Mengurangi kesenjangan pendanaan antara satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya.

Dana Perimbangan bertujuan untuk memberikan bantuan keuangan kepada daerah dalam membiayai kewenangannya, mengurangi ketidaksetaraan dalam sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta mengurangi disparitas pendanaan antar daerah. Sesuai dengan tujuannya, Dana Perimbangan juga diarahkan untuk lebih mendorong pemberdayaan dan peningkatan ekonomi daerah, serta menciptakan sistem pembayaran yang adil, proporsional, rasional, transparans, partisipatif, bertanggung jawab (akuntabel), sambil memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah tersebut. Dana perimbangan diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sumber dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk membiayai kebutuhan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi. Tidak seperti Dana Alokasi Umum (DAU) yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan fiskal antar-daerah, DBH bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan fiskal vertikal antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah (perbedaan dalam kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal). Pembagian DBH didasarkan pada prinsip "*By Origin*" yang berarti daerah yang menghasilkan lebih banyak akan mendapatkan porsi yang lebih besar dari DBH. Dana Bagi Hasil (DBH) atau dana bagian daerah terdiri atas:

1. Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.
 2. Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Penerimaan negara dari bea perolehan atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas daerah provinsi.
 - b. 64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil, dan disalurkan ke rekening kas daerah kabupaten/kota.
 3. Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.
- b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bentuk hibah yang disediakan untuk semua kabupaten dan kota dengan tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas fiskal dan kebutuhan keuangan mereka. Pendistribusian DAU didasarkan pada formula yang memperhitungkan prinsip-prinsip tertentu, yang umumnya mengarah pada pemberian lebih banyak dana kepada daerah-daerah yang lebih miskin dan terbelakang. Dengan kata lain, tujuan utama alokasi DAU adalah untuk mencapai pemerataan dalam penyediaan layanan publik antara pemerintah daerah di seluruh Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh (Kuncoro, 2014).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DAU adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan untuk mencapai keseimbangan keuangan antara daerah-daerah dalam membiayai pengeluaran mereka dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, DAU memiliki peran yang sangat penting, dan merupakan sumber utama penerimaan bagi semua pemerintah daerah dalam anggaran APBD mereka. DAU dapat dianggap sebagai respon dari pemerintah terhadap keinginan daerah untuk memiliki kendali lebih besar terhadap keuangan negara. Selain itu, DAU bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam hal keuangan antara pemerintah pusat dan ketidaksetaraan antar pemerintah daerah satu sama lain karena perbedaan sumber daya yang

tersedia di setiap daerah. Penggunaan DAU ditentukan oleh masing-masing daerah, dan dalam bagian ini, jumlah DAU dialokasikan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

c. Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendukung pembiayaan kegiatan khusus yang merupakan wewenang daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK terbagi menjadi DAK Fisik dan DAK Non Fisik;

- i. DAK Fisik digunakan sebagai alat untuk mendanai infrastruktur, sarana/prasarana pelayanan publik, dan dukungan kegiatan ekonomi yang merupakan kewenangan daerah, dengan memperhatikan prinsip "*Money Follow Program*." DAK Fisik terdiri dari DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Afirmasi, dan DAK Fisik Penugasan.
- ii. DAK Non Fisik, bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas dengan harga yang semakin terjangkau. Pada tahun 2021, DAK Non Fisik mencakup berbagai program, seperti Dana Bantuan Operasional Sekolah, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional Keluarga

Berencana, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pelayanan Administrasi Kependudukan, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Kepariwisataaan, Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah, Dana Perlindungan Anak dan Perempuan, Dana Fasilitasi Penanaman Modal, serta Dana Pelayanan Ketahanan Pangan dan Pertanian.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Tinjauan Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian dan Nama Peneliti & Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Rencana Anggaran Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Iqbal, Rachman, Rodiah, 2021).	Dependen: Kinerja Keuangan Independen: Rencana Anggaran, Realisasi Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah.	Hasil penelitian ini menunjukkan Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

No.	Judul Penelitian dan Nama Peneliti & Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (Sari, Halmawati, 2021).	Dependen: Kinerja Keuangan Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi, dan Belanja Daerah.	Hasil penelitian menunjukkan, Regional Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
3.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Digidowiseis, Subiyanto, Cahyanto, 2022).	Dependen: Kinerja Keuangan Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal.	Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.
4.	Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang Dan Jasa, Dan Belanja Tak Terduga Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di	Dependen: Penyerapan Anggaran Independen: Belanja Modal, Belanja Barang Dan Jasa, Dan	Hasil penelitian menunjukkan, Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran sedangkan, Belanja Tak Terduga tidak

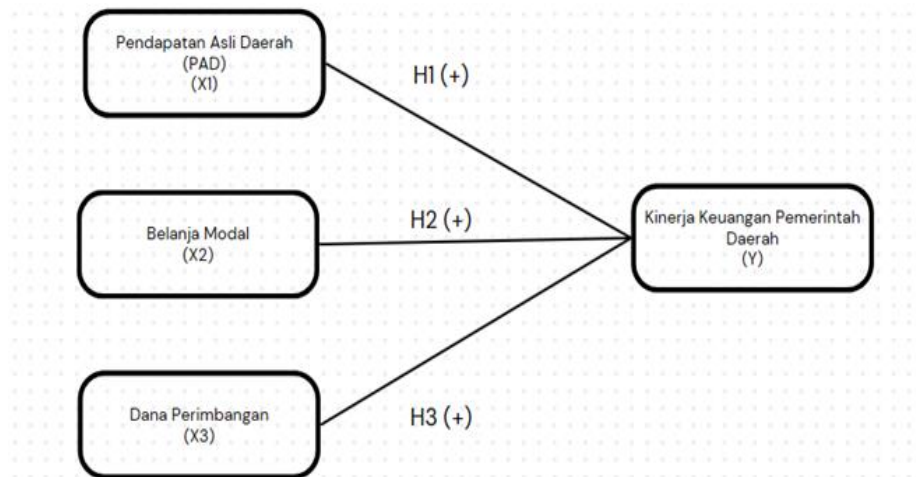
No.	Judul Penelitian dan Nama Peneliti & Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Provinsi Sumatera Selatan (Dyna, Masnila, Wahyudi, 2023)	Belanja Tak Terduga	berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara (Natalia, Suprpto, 2023)	Dependen: Kinerja Keuangan Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah pemerintah di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

2.8 Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Dana Perimbangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun bentuk kerangka konseptual digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Penelitian



2.9 Hipotesis Penelitian

2.9.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber pendapatan yang paling penting bagi sebuah daerah untuk memenuhi kebutuhannya adalah pendapatan asli daerah. Selain itu, PAD memainkan peran penting dalam menentukan kapasitas daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahan secara otonomi. Dengan autonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah akan memiliki lebih banyak kebebasan finansial. Oleh karena itu, peran PAD sangat memengaruhi kinerja fiskal pemerintah daerah. Diharapkan bahwa sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan masyarakat di daerah tersebut. Untuk

membayar segala kewajiban daerah dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penerimaan daerah diperlukan. Pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat melalui PAD yang dihasilkan daerah, yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan.

Menurut (Nugroho & Rohman, 2012), peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah, yang berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah. (Darwanis & Saputra, 2014) menyatakan bahwa pemerintah dapat meningkatkan PAD dengan memungut pajak dan retribusi daerah, yang dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan, Sari & Halmawati (2021) menguji Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Niswani & Firdaus (2022) juga menunjukkan hasil yang sama signifikan. Dari Hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, seperti yang diketahui bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka, semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Jika suatu daerah dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi Pajak Daerah,

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah, ini akan menunjukkan kemampuan daerah untuk mengelola dan optimalisasi pendapatan asli daerah mereka. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha₁: Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

2.9.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengeluaran yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam anggaran dianggap sebagai belanja modal, menurut pasal 50 huruf c Permendagri No 59 Tahun 2007, yang diubah oleh Permendagri No 13/2006 Tentang pengelolaan keuangan daerah. Pengeluaran ini dianggap sebagai belanja modal. Selanjutnya, pada pasal 53 ayat 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 menetapkan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal adalah harga beli atau bangun aset ditambah semua biaya yang terkait dengan aset tersebut. Pengadaan atau pembangunan aset sampai aset siap digunakan. Belanja modal dapat diklasifikasikan dalam lima kategori utama, yaitu modal tanah, modal peralatan dan mesin, modal untuk gedung dan bangunan,

jalan, irigasi, dan jaringan, bersama dengan belanja modal fisik tambahan.

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk aset tetap yang digunakan untuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kekayaan daerah. Semakin banyak belanja modal yang digunakan untuk pembangunan akan menghasilkan peningkatan pendapatan daerah melalui pajak, retribusi, dan investasi, yang berdampak pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah (Ajani, 2015). Kinerja keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh belanja modal.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dyna, Masnila, Wahyudi (2023) menguji pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah memiliki pengaruh positif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya Belanja Modal, diharapkan pemerintah daerah dapat menggunakan sumber pendanaan tersebut untuk kegiatan dan proyek pemerintah yang konstruktif dan produktif. Diharapkan bahwa kegiatan tersebut akan menghasilkan lebih banyak pendapatan, sehingga Pendapatan Asli Daerah akan meningkat, dan pada akhirnya daerah tersebut akan dapat mendanai sendiri kegiatan pemerintahannya. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha₂: Belanja Modal Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.9.3 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan daerah merupakan gambaran dari bagaimana pemerintah daerah menjalankan aktivitasnya untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dalam aspek keuangan yang terdokumentasikan dalam laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah tersebut. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dialokasikan pendapatan Anggaran kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Perimbangan terdiri dari; 1). Dana Bagi Hasil (DBH), 2), Dana Alokasi Umum (DAU) dan 3). Dana Bagi Hasil adalah dana yang diterima oleh pemerintah daerah berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Umum didefinisikan sebagai dana perimbangan untuk daerah yang telah dialokasikan dalam APBN berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan neto dalam negeri, yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan aspek keadilan dan pemerataan, selaras dengan pembangunan pemerintah. Sedangkan, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang didanai dari pendapatan APBN yang

diberikan kepada daerah tertentu untuk mendukung kegiatan khusus yang merupakan tanggung jawab pemerintahan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Natalia & Suprpto (2023) menunjukkan bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa, dalam hal pemenuhan standar pelayanan minimum, daerah yang memiliki sumber daya yang terbatas memerlukan subsidi atau Dana Perimbangan. Dengan adanya Dana Perimbangan diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah memanfaatkan sumber pendanaan tersebut untuk pelaksanaan kegiatan dan proyek pemerintah yang bersifat positif dan produktif. Dari upaya ini diharapkan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar, yang pada gilirannya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, daerah tersebut akan mampu mendukung pendanaan kegiatan pemerintahnya sendiri. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha₃: Dana Perimbangan Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang berjumlah 31 kabupaten/kota. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling*. Adapun kriteria dalam pengambilan sampel yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah yang memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh BPK RI.
2. Pemerintah daerah yang memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mencantumkan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan (Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2021).

3.2 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi APBD Tahun 2017-2021 (Laporan Realisasi Anggaran) Kabupaten/Kota Jawa Timur yang berjumlah 31 kabupaten/kota. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.3.1 Variabel Dependen (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Kinerja keuangan adalah gambaran tentang sejauh mana pengelolaan keuangan telah mencapai tujuan dalam pelaksanaan program kebijakan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil penilaian kuantitatif dari suatu program/kegiatan dalam mencapai sasaran dan tujuan pemerintah daerah. Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi dan menentukan tindakan yang akan diambil untuk meningkatkan kualitas sektor publik. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah, digunakan perhitungan rasio-rasio keuangan sebagai alat ukur atau indikator kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio yang digunakan penelitian ini adalah Rasio Efektivitas.

3.3.1.1 Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan target yang ditetapkan. Kemampuan pendapatan asli daerah dinilai

efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100% (Mahmudi, 2016). Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Sangat efektif : > 100%
2. Efektif : 100%
3. Cukup efektif : 90% - 99%
4. Kurang efektif : 75%-89%
5. Tidak efektif : < 75%

$$\text{Rasio Efektivitas: } \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, 2016

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan.

3.3.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2012). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun perhitungan yang digunakan dalam menganalisis PAD adalah:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = \text{Total Pajak Daerah} + \text{Total Retribusi} + \text{Total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan} + \text{Pendapatan Daerah Yang Lain-lain}$$

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

3.3.3.2 Belanja Modal

Menurut (Mardiasmo, 2009), belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharannya. Belanja modal dapat diklasifikasikan dalam lima kategori utama, yaitu modal tanah, modal peralatan dan mesin, modal untuk gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, bersama dengan belanja modal fisik tambahan. Adapun perhitungan yang digunakan dalam menganalisis belanja modal adalah:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya}$$

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

3.3.3.3 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah untuk membiayai kegiatan daerah sesuai dengan desentralisasi. Tujuan dari dana perimbangan adalah untuk menyeimbangkan kemampuan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sistem pembagian dana yang berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, demokrasi, keterbukaan, dan efisiensi. Untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi, dana perimbangan diberikan dengan memperhatikan potensi, situasi, dan keperluan daerah, serta jumlah dana yang dibutuhkan (UU No. 33/2004). Dana Perimbangan terdiri dari tiga komponen, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun perhitungan yang digunakan dalam menganalisis dana perimbangan adalah:

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Dana Bagi Hasil (DBH)} + \text{Dana Alokasi Umum (DAU)} + \text{Dana Alokasi Khusus (DAK)}$$

Sumber: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

3.4 Hipotesis Operasional

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah:

$H_{0_1}: \beta_1 \leq 0$ Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

$H_{a_1}: \beta_1 > 0$ Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah:

$H_{0_2}: \beta_2 \leq 0$ Belanja Modal tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

$H_{a_2}: \beta_2 > 0$ Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah:

$H_{0_3}: \beta_3 \leq 0$ Dana perimbangan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

$H_{a_3}: \beta_3 > 0$ Dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Statistik deskriptif

Memberikan pembaca informasi umum mengenai karakteristik data yang akan dianalisis. Aspek-aspek yang umumnya dijabarkan meliputi *range*, standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai data dan peristiwa yang dikumpulkan melalui proses penelitian, tanpa melakukan generalisasi atau mengambil kesimpulan terhadap seluruh populasi yang menjadi fokus penelitian (Ahmadien & Syarkani, 2020).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang tidak bias dan efisien (*Best Linier Unbias Estimator/BLUE*) dari suatu persamaan regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil (*Least Squares*), perlu dilakukan pengujian dengan jalan memenuhi persyaratan asumsi klasik yang meliputi:

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Dalam penelitian ini, menggunakan uji normalitas data dengan uji non parametik

One Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dalam mengambil keputusan pada uji *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*, pedoman yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan (Sig) atau probabilitas $< 0,05$ maka distribusi data adalah tidak normal atau sama dengan H_1 tidak didukung.
2. Jika nilai signifikan (Sig) atau probabilitas $> 0,05$ maka distribusi data adalah normal atau sama dengan H_1 didukung.

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi di antara variabel bebas atau tidak. Salah satu cara untuk menguji gejala multikolinieritas dalam model regresi adalah dengan melihat nilai *Tolerance (TOL)* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* < 10 atau nilai *Tolerance (TOL)* $> 0,10$ maka model regresi dinyatakan tidak mengandung multikolinieritas.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah ada variasi yang berbeda pada residual antara satu observasi dengan observasi lain dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak memiliki masalah heterokedastisitas. Untuk menentukan keberadaan heterokedastisitas, dapat dilihat pada pola *Scatterplot* berikut:

1. Jika terdapat pola yang konsisten, titik-titik yang membentuk pola teratur, maka hal ini menunjukkan adanya heterokedastisitas.
2. Jika tidak terlihat pola yang spesifik, titik-titik pada sumbu Y tersebar di bawah dan di atas angka 0, maka hal ini menunjukkan tidak adanya heterokedastisitas.

3.5.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu (*error*) pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ dalam sebuah model regresi linier (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi, maka informasi yang diberikan bisa menyesatkan sehingga perlu diupayakan agar tidak terjadi autokorelasi. Uji Durbin-Watson

adalah alat statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam model regresi ini.

3.5.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini memakai analisis regresi linear berganda yang tujuannya mengetahui arah dan sebesar apa pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun persamaan regresi untuk menguji hipotesis tersebut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	= Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Variabel Dependen)
a	= Konstanta
b ₁ b ₂ b ₃	= Koefisien Regresi Model
X ₁	= Pendapatan Asli Daerah
X ₂	= Belanja Modal
X ₃	= Dana Perimbangan
ε	= <i>Error Term Model</i> (Variabel Residual)

3.5.5 Analisis Koefisien Determinasi

Tujuan dari koefisien determinasi (R^2) adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel

dependen amat terbatas (Ghozali, 2016). Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

1. Jika KD mendekati nol (0), maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah.
2. Jika KD mendekati satu (1), maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

3.6 Uji Hipotesis

3.6.1 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pada dasarnya, uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan *degree of freedom* 0,05. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Ho tidak didukung jika *p-value (significant-t)* $< 0,05$ dan koefisien regresi sesuai dengan yang diprediksi.
2. Ho didukung jika *p-value (significant-t)* $> 0,05$ dan koefisien regresi tidak sesuai dengan yang diprediksi.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan populasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 31 kabupaten/kota. Pengolahan variabel dalam penelitian ini menggunakan IBM SPSS versi 23.

Tabel 4.1

Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah
Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	31
Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan kriteria	0
Jumlah sampel	31
Total sampel penelitian untuk 5 tahun (2017-2021)	155
Data <i>Outlier</i>	25
Jumlah sampel yang digunakan	130

4.2 Data Pemerintah Daerah Jawa Timur

Melalui situs jatimprov.go.id Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950. Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur. Adapun Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur terdiri atas Sekretariat Daerah dengan 11 Biro dan Sekretariat DPRD, 20 Dinas, Inspektorat, 1 Badan, 12 Lembaga Teknis Daerah, 4 Lembaga lain, dan 5 Rumah Sakit Daerah.

Menurut database BPS tahun 2010, Jawa Timur terletak di antara 11100' Bujur Timur – 11404' Bujur Timur dan 7012' Lintang Selatan – 8048' Lintang Selatan, dengan luas wilayah sebesar 47.963 km² yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Wilayah daratan Jawa Timur memiliki luas sebesar 88,70% atau 42.541 km², sedangkan luas Kepulauan Madura sebesar 11,30% atau 5.422 km². Tahun 2022 diperkirakan jumlah penduduk di Jawa Timur sebanyak 41,14 juta jiwa. Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2

Daftar Kabupaten/Kota Jawa Timur

No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
1.	Kabupaten Bangkalan	20.	Kota Malang
2.	Kabupaten Banyuwangi	21.	Kabupaten Mojokerto
3.	Kota Batu	22.	Kota Mojokerto
4.	Kabupaten Blitar	23.	Kabupaten Nganjuk
5.	Kota Blitar	24.	Kabupaten Ngawi
6.	Kabupaten Bojonegoro	25.	Kabupaten Pacitan
7.	Kabupaten Bondowoso	26.	Kabupaten Pamekasan
8.	Kabupaten Gresik	27.	Kabupaten Pasuruan
9.	Kabupaten Jember	28.	Kota Pasuruan
10.	Kabupaten Jombang	29.	Kabupaten Ponorogo
11.	Kabupaten Kediri	30.	Kabupaten Probolinggo
12.	Kota Kediri	31.	Kabupaten Sampang
13.	Kabupaten Lamongan	32.	Kabupaten Sidoarjo
14.	Kabupaten Lumajang	33.	Kabupaten Situbondo
15.	Kabupaten Madiun	34.	Kabupaten Sumenep

No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
16.	Kota Madiun	35.	Kota Surabaya
17.	Kabupaten Magetan	36.	Kabupaten Trenggalek
18.	Kota Magetan	37.	Kabupaten Tuban
19.	Kabupaten Malang	38.	Kabupaten Tulungagung

4.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel dependen dalam penelitian ini ialah kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus berikut ini:

$$\text{Rasio Efektivitas: } \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, 2016

Adapun contoh perhitungan dari kinerja keuangan dari salah satu kabupaten/kota di Jawa Timur adalah Kota Surabaya, sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil perhitungan dari rasio efektivitas

No.	Kabupaten /Kota	Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Target Pendapatan Asli Daerah	Kinerja Keuangan	Keterangan
1.	Surabaya	2017	5.161.844.571.171.67	4.709.645.546.043.00	110%	Sangat efektif
2.	Surabaya	2018	4.973.031.004.727.10	4.396.287.090.225.00	113%	Sangat efektif
3.	Surabaya	2019	5.381.920.253.809.67	5.234.687.226.266.00	103%	Sangat efektif
4.	Surabaya	2020	4.289.960.292.372.98	5.035.094.239.075.00	85%	Kurang efektif
5.	Surabaya	2021	4.727.280.629.669.69	5.322.810.142.550.00	89%	Kurang efektif

Sumber: Lampiran 2

4.4 Variabel Independen

4.4.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus berikut ini:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = \text{Total Pajak Daerah} + \text{Total Retribusi} + \text{Total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan} + \text{Pendapatan Daerah Yang Lain-lain}$$

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Contoh perhitungan PAD dari salah satu kabupaten/kota di Jawa Timur yaitu Kota Surabaya, yang telah tercantum di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Perhitungan dari pendapatan asli daerah

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pendapatan Pajak Daerah	3.595.670.492.734,31	3.817.402.592.324,00	4.018.722.251.948,00	3.277.053.240.709,00	3.649.732.215.700,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	557.966.574.669,78	346.798.583.544,80	396.244.802.735,94	301.268.032.272,33	235.591.662.262,54
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	134.668.941.611,95	140.036.260.032,70	268.575.571.840,77	48.541.103.496,40	160.867.394.117,45
4.	Lain – Lain PAD yang Sah	873.538.562.155,63	668.793.568.825,60	698.377.627.284,96	663.097.915.895,25	681.089.357.589,70
5.	Jumlah	5.161.844.571.171,67	4.973.031.004.727,10	5.381.920.253.809,67	4.289.960.292.372,98	4.727.280.629.669,69

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Surabaya 2017 – 2021

4.4.2 Belanja Modal

Belanja modal dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus berikut ini:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya}$$

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Contoh perhitungan belanja modal dari salah satu kabupaten/kota di Jawa Timur yaitu Kota Surabaya, yang telah tercantum di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Perhitungan dari belanja modal

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Belanja tanah	733.007.120.013,00	451.951.790.061,00	657.676.408.325,00	299.284.778.936,00	171.876.414.740,00
2.	Belanja peralatan dan mesin	514.721.364.936,00	540.722.786.920,00	527.897.491.678,00	204.643.054.890,00	163.131.234.366,00
3.	Belanja gedung dan bangunan	577.147.375.916,41	759.324.470.024,45	735.791.316.962,00	605.850.297.517,00	345.118.654.570,00
4.	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	687.870.707.690,00	671.323.905.021,00	819.894.483.911,00	453.938.706.031,00	329.418.247.818,00
5.	Belanja aset tetap lainnya	2.642.716.710,00	5.396.119.683,00	12.110.233.206,00	18.765.230.254,00	6.791.951.896,00
6.	Belanja aset lainnya	2.501.575.961,00	1.341.967.600,00	934.890.000,00	1.181.091.977,00	-
7.	Jumlah	2.517.891.658.246,41	2.430.061.039.309,45	2.754.304.824.082,00	1.583.663.159.605,00	1.016.336.503.390,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Surabaya 2017 – 2021

4.4.3 Dana Perimbangan

Dana perimbangan dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus berikut ini:

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Dana Bagi Hasil (DBH)} + \text{Dana Alokasi Umum (DAU)} + \text{Dana Alokasi Khusus (DAK)}$$

Sumber: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

Contoh perhitungan dana perimbangan dari salah satu kabupaten/kota di Jawa Timur yaitu Kota Surabaya, yang telah tercantum di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Perhitungan dari dana perimbangan

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	358.835.507.237,00	410.894.374.246,00	317.363.050.361,00	377.105.658.618,00	603.035.148.835,00
2.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	16.587.434.797,00	67.464.332.495,00	49.236.626.815,00	44.873.086.335,00	1.167.156.329.918,00
3.	Belanja gedung dan bangunan	1.211.713.876.000,00	-	-	-	-
4.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.211.713.876.000,00	1.211.713.876.000,00	1.254.344.402.000,00	1.203.461.965.000,00	15.584.019.460,00
5.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	378.498.806.664,00	398.797.386.102,00	380.383.564.271,00	420.040.961.516,00	368.562.931.123,00
6.	Jumlah	1.965.635.624.698,00	2.088.869.968.843,00	2.001.327.643.447,00	2.045.481.662.469,00	2.154.338.429.336,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Surabaya 2017 – 2021

4.5 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah penjelasan mengenai karakteristik data yang akan dianalisis, yaitu mengenai range, standar deviasi, nilai

minimum, dan nilai maksimum. Hasil dari analisis statistik deskriptif dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	130	135.349.867.861	1.921.244.253.336	443.354.870.650	324.064.058.999
Belanja Modal	130	140.058.487.669	919.012.883.755	389.736.765.634	155.024.251.025
Dana Perimbangan	130	1.045.809.355.927	2.492.578.744.298	1.526.090.973.835	322.003.246.051
Kinerja Keuangan	130	.82	1.41	1.05	.098
Valid N (listwise)	130				

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS 23, 2024

Berdasarkan hasil dari pengujian statistik deskriptif pada tabel 4.7, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur memiliki nilai minimum sebesar Rp. 135.349.867.861 yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sampang pada tahun 2018. Sedangkan, nilai maksimum sebesar Rp. 1.921.244.253.335 yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021. Adapun nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 443.354.870.650 dengan standart deviasi sebesar Rp. 324.064.058.999.
2. Adapun Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur memiliki nilai minimum sebesar Rp. 140.058.487.669 dari Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun 2020. Dan nilai maksimum sebesar Rp. 919.012.883.755 dari Pemerintah

Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021, dengan rata-rata sebesar Rp. 389.736.765.634 serta standart deviasi sebesar Rp. 155.024.251.025.

3. Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur memiliki nilai minimum sebesar Rp. 1.045.809.355.927 yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun 2019, serta nilai maksimum sebesar Rp. 2.492.578.744.298 dari Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2019. Dengan nilai rata-rata sebesar Rp. 1.526.090.973.835 dan standart deviasi sebesar Rp. 322.003.246.051.
4. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, memperoleh nilai minimum sebesar 0,82 dari Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2018. Adapun nilai maksimum sebesar 1,41 dari Pemerintah Kabupaten Jombang pada tahun 2021. Dengan nilai rata-rata sebesar 1,05 dan standart deviasi sebesar 0,098.

4.6 Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang tidak bias dan efisien dari suatu persamaan regresi linier berganda, perlu dilakukan pengujian dengan memenuhi persyaratan asumsi klasik yang meliputi, uji normalitas data, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas.

4.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Dapat dilakukan dengan uji non parametik One Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika nilai signifikan (Sig) atau probabilitas $< 0,05$ maka distribusi data adalah tidak normal atau sama dengan H_1 ditolak. Namun, Jika nilai signifikan (Sig) atau probabilitas $> 0,05$ maka distribusi data adalah normal atau sama dengan H_1 diterima. Berikut hasil uji normalitas One Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) ditunjukkan pada tabel 4.8:

Tabel 4.8
Hasil Uji Analisis Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Sebelum *Outlier*

		Unstandardized Residual
N		155
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.16134047
Most Extreme Differences	Absolute	.140
	Positive	.140
	Negative	-.115
Test Statistic		.140
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS 23, 2024

Hasil analisis uji normalitas pada kolom Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,000 yang artinya bahwa data tersebut tidak normal, karena kurang dari 0,05 sehingga diperlukannya menghilangkan data yang Outlier. Setelah menghapus data Outlier hasil dari uji normalitas disajikan pada tabel 4.9.

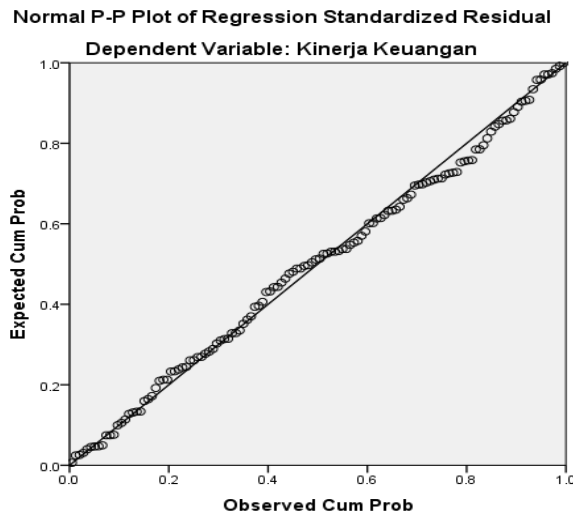
Tabel 4.9
Hasil Uji Analisis Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Sesudah *Outlier*

		Unstandardized Residual
N		130
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.0946601
Most Extreme Differences	Absolute	.054
	Positive	.054
	Negative	-.037
Test Statistic		.054
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS 23, 2024

Dari tabel 4.9 diperoleh nilai signifikan sebesar 0,200 yang dimana nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal. Tampilan Uji normalitas P-P Plot dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut:

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas P-P Plot



Gambar 4.1 menunjukkan bahwa Grafik Normal P-P Plot, terlihat titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi. kesimpulan dari pengujian Kolmogorov-Smirnov (K-S) dan grafik Normal P-P Plot di gambar 4.1 adalah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal.

4.6.2 Uji Multikolinieritas

Salah satu cara untuk menguji gejala multikolinieritas dalam model regresi adalah dengan melihat nilai Tolerance (TOL) dan Variance Inflation Factor (VIF) dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 atau nilai Tolerance > 0,10, maka suatu model regresi dinyatakan

tidak terdapat multikolinieritas. Disajikan pada tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Analisis Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pendapatan Asli Daerah	.550	1.818
	Belanja Modal	.582	1.717
	Dana Perimbangan	.512	1.954

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS 23, 2024

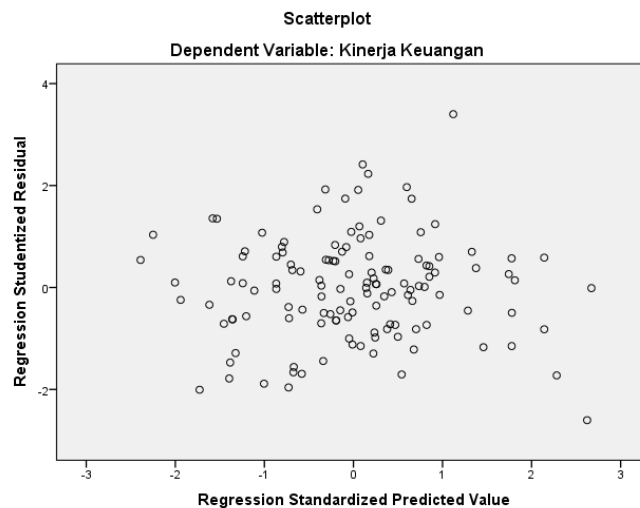
Berdasarkan hasil uji multikolinieritas tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* pada variabel independen yaitu, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan lebih besar dari 0,10. Adapun pada nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil atau kurang dari 10. Dapat disimpulkan bahwa model regresi dari penelitian ini bebas dari multikolinieritas.

4.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Pada dasarnya, uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual (*error*) antara satu pengamatan ke pengamatan lain dalam sebuah model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini, alat uji yang digunakan

untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat pola *Scatterplot*.

Gambar 4.2
Uji Heterokedastisitas dengan *Scatterplot*



Berdasarkan Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar dengan pola yang acak di atas ataupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan tidak terjadinya masalah heterokedastisitas pada model regresi tersebut.

4.7 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu (*error*) pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ dalam sebuah model regresi linier. Uji autokorelasi pada data time series dilakukan karena biasanya terdapat penyimpangan asumsi yang dilakukan. Uji Durbin-Watson adalah alat

statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam model regresi ini. Disajikan pada tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Analisis Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.885 ^a	.783	.778	.00981	1.872

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS 23, 2024

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai dari Durbin-Watson adalah 1.985. Dari tabel Durbin-Watson dengan nilai signifikansi $\alpha = 5\%$, dimana jumlah data $n = 145$ dan $k = 3$. Diperoleh nilai $dL = 1,6866$ dan $dU = 1,7710$. Karena nilai Durbin-Watson dari tabel 4.11 adalah 1.826, terletak di antara nilai dU sebesar 1.7710 dan $4-dU$ atau $1,7710 < 1,872 < 4-1,7710$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari autokorelasi.

4.8 Regresi Linier Berganda

Tujuan dari analisis regresi linier berganda adalah untuk mengetahui arah dan seberapa jauh pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Belanja Modal (X2), dan Dana Perimbangan (X3) terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil regresi berganda dengan bantuan program SPSS 23 disajikan pada tabel 4.12 sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1(Constant)	4.479	1.305
Pendapatan Asli Daerah	.056	.020
Belanja Modal	-.022	.029
Dana Perimbangan	-.154	.061

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS 23, 2024

Berdasarkan tabel 4.12 adapun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 4.479 + 0.056X_1 - 0.022X_2 - 0.154X_3$$

Keterangan:

- Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Variabel Dependen)
- X1 = Pendapatan Asli Daerah
- X2 = Belanja Modal
- X3 = Dana Perimbangan

Rumusan model regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam persamaan model regresi linier berganda, diperoleh nilai konstanta sebesar 4,479. Menunjukkan bahwa variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah tanpa dipengaruhi oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan hasil konstan sebesar 4,479.
2. Koefisien regresi pada variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai sebesar 0,056 yang berarti bahwa adanya pengaruh positif

dari variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Koefisien tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu-satuan dari variabel Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,056.

3. Koefisien regresi pada variabel Belanja Modal memiliki nilai sebesar -0,022 yang berarti adanya pengaruh negatif dari variabel Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Koefisien tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu-satuan dari variabel Belanja Modal akan menurunkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar -0,022.
4. Koefisien regresi pada variabel Dana Perimbangan memiliki nilai sebesar -0,154. Adanya pengaruh negatif pada variabel Kinerja Keuangan. Koefisien tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu-satuan dari variabel Dana Perimbangan akan menurunkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar -0,154.

4.9 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi selalu berada di antara 0 dan 1. Semakin kecil nilai (R^2), semakin terbatas kemampuan variabel independen dalam menjelaskan

variasi variabel dependen. Sebaliknya, semakin mendekati 1, semakin banyak informasi yang diberikan oleh variabel independen untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 4.13
Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.885 ^a	.783	.778	.00981

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS 23, 2024

Varibel Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh 77,8% terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Karena hasil dari tabel 4.13 menunjukkan *Adjusted R²* sebesar 0,778 atau 77,8%, sedangkan sisanya sebesar 22,2% dari 100% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel penelitian.

4.10 Uji Hipotesis

4.10.1 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji Statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan) terhadap variabel dependen (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah). Pengujian ini menggunakan degree of freedom (α) 5%. Dasar untuk menentukan Tingkat suatu variabel independen yaitu:

- a. Jika nilai probabilitas $< \alpha$, maka H_0 tidak didukung, H_a didukung.

b. Jika nilai probabilitas $\geq \alpha$, maka H_0 didukung, H_a tidak didukung.

Berikut hasil uji t beserta interpretasinya:

Tabel 4.14
Hasil Rekapitulasi Uji Hipotesis

Hipotesis	Deskripsi	<i>Coefficient</i>	Prob.	Keterangan
H ₁	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	2.757	0.007	Didukung Data
H ₂	Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	-0.761	0.448	Tidak Didukung Data
H ₃	Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	-2.546	0.012	Tidak Didukung Data

Sumber: Lampiran 10

4.10.1.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil pengujian diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,007, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dan memiliki koefisien regresi sebesar 2,757. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Tingginya Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan oleh daerah, dapat mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap pendanaan dari pemerintah pusat. Sehingga memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah

telah memiliki Kinerja Keuangan yang baik. Dapat disimpulkan bahwa H_1 didukung data.

Kemandirian suatu daerah dapat dilihat melalui kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memanfaatkan potensi kekayaan dan sumber daya yang lebih tinggi daripada pendapatan rata-rata daerah. Jumlah pendapatan asli daerah yang tinggi juga berdampak positif pada kondisi keuangan pemerintah daerah. Penggalan potensi kemandirian daerah hanya dapat dicapai melalui manajemen keuangan yang baik. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan dampak positif bagi daerah, termasuk pendanaan mandiri untuk kegiatan dan kebutuhan lokal. Teori keagenan menegaskan bahwa pendapatan asli daerah berasal dari sumber-sumber yang ada di dalam daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menunjukkan manajemen keuangan yang bertanggung jawab. Sebagai agen (pemerintah), mereka dituntut untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, yang dilakukan melalui pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan tugas pemerintah daerah.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Sari & Halmawati (2021) dan Niswani & Firdaus (2022) menguji

Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

4.10.1.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil penelitian diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,448 nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan memiliki koefisien regresi sebesar -0,761. Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan dan memiliki arah negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Besarnya Belanja Modal belum sepenuhnya mencerminkan banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak Pembangunan yang dilakukan belum dapat menentukan tingkat Kinerja Keuangan. Dapat disimpulkan bahwa H_2 tidak didukung data.

Belanja modal sering dianggap sebagai pemborosan jika tidak diarahkan dengan tepat oleh pemerintah daerah. Namun, sebenarnya belanja modal memiliki manfaat jika digunakan untuk mengembangkan daerah dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah setempat. Meskipun demikian, sulit untuk merepresentasikan kinerja

keuangan pemerintah daerah hanya berdasarkan belanja modal. Sejalan dengan teori keagenan, pengelolaan aset yang diperoleh dari manajemen termasuk belanja modal harus dilakukan dengan tanggung jawab. Agen (pemerintah) yang bertugas mengelola belanja modal harus memastikan pemeliharaan aset tetap dilakukan dengan baik.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh, Dyna, Masnila, Wahyudi (2023) yang menunjukkan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh positif dan signifikansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

4.10.1.3 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil penelitian diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,012 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dan memiliki koefisien regresi sebesar -2,546. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Semakin tinggi pemerintah daerah menerima Dana Perimbangan dari pemerintah pusat, menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada

pemerintah pusat. Tingkat ketergantungan yang tinggi dapat mencerminkan bahwa Kinerja Keuangan masih rendah. Dapat disimpulkan bahwa H_3 tidak didukung data.

Ketika pemerintah daerah menerima lebih banyak dana dari pusat, ini menandakan situasi keuangan yang kurang menguntungkan bagi daerah tersebut. Keterbatasan dalam penggunaan sumber daya juga berperan, karena daerah tidak memiliki kebebasan penuh untuk memanfaatkannya. Teori keagenan mendukung pandangan ini, terutama dalam konteks dana perimbangan. Meskipun dana perimbangan seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan layanan publik, kenyataannya seringkali berbeda. Jumlah dana yang diterima oleh daerah seringkali tidak signifikan dan tidak berdampak besar pada posisi keuangan mereka. Selain itu, ketergantungan agen atau pemerintah daerah pada pusat untuk dukungan keuangan dapat mengakibatkan penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan Natalia & Suprpto (2023) menunjukkan bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif dan signifikansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dianalisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Variabel Pendapatan Asli Daerah terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Periode 2017-2021 sehingga H_1 didukung. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan daerah dan menilai kemampuan daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan serta merencanakan pengembangan daerah. Dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat memberikan pemerintah daerah kendali yang lebih besar atas keuangan daerah.
- 2) Variabel Belanja Modal terbukti berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Periode 2017-2021 sehingga H_2 tidak didukung. Hal ini kemungkinan terjadi disebabkan dalam pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana yang dilakukan oleh negara melalui Belanja Modal belum tersebar merata oleh pemerintah pusat, ketidakmerataan pembangunan yang tercermin dalam alokasi anggaran Belanja Modal.

- 3) Variabel Dana Perimbangan terbukti berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun Periode 2017-2021 sehingga H₃ tidak didukung. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih fokus pada meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pos-pos yang berkontribusi pada kinerja keuangan. Namun, untuk pengeluaran di luar pos-pos tersebut, seperti pengeluaran rutin. Pemerintah daerah menggunakan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat, semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat, yang pada akhirnya dapat mengurangi kemandirian pemerintah daerah.

5.2 Implikasi Hasil Penelitian

5.1 Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah harus terus meningkatkan kinerja keuangannya melalui potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut, agar dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik. Dan pemerintah daerah mesti berupaya dalam mengelola keuangannya sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan daerahnya.

5.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat meninjau lebih dalam lagi mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah untuk provinsi lainnya mengingat Indonesia memiliki 38 provinsi. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen dan menggunakan rasio selain rasio yang ada di penelitian ini.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan peneliti dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Peneliti mengalami kesulitan dalam memperoleh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur khususnya pada Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Magetan, Kota Malang, Kota Mojokerto, dan Kota Pasuruan. Disebabkan keterbatasan dalam mengakses situs daerah yang terkait.
- 2) Peneliti mengalami kesulitan dalam membaca Laporan Keuangan, karena beberapa Laporan Keuangan berbentuk *scan* dokumen.
- 3) Variabel independen dalam penelitian ini pada bagian 'Belanja' hanya menjelaskan mengenai Belanja Modal. Padahal sumber dana 'Belanja' bukan hanya Belanja Modal. Terdapat sumber dana 'Belanja' yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini yakni, Belanja Operasional dan Belanja Tak Terduga.

5.4 Saran

Dari kesimpulan penelitian, adapun saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memperoleh Laporan Keuangan secara lengkap, jelas dan telah diaudit dapat menghubungi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) daerah yang ingin diteliti.
- 2) Untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen seperti Belanja Operasional dan Belanja Tak Terduga.

DAFTAR PUSTAKA

- Andirfa, M., Basri, H., & Majid, M. S. A. (2016). Pengaruh belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(3).
- Ahmaddien, I., & Syarkani, Y. (2020). Statistika Terapan dengan Sistem SPSS.
- Anggreni, N. K. A., Artini, S., & Gede, L. (2018). *Pengaruh PAD, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali* (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Alvaro, R., & Wibowo, A. P. S. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Provinsi di Indonesia. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 5(2).
- Ardelia, I. N., Wulandari, H. K., Ernitawati, Y., & Dumadi, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Kabupaten Dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(1), 60-80.
- Agustianti, R., Nussifera, L., Angelianawati, L., Meliana, I., Sidik, E. A., Nurlaila, Q., ... & Hardika, I. R. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Tohar Media.
- Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, R. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2572-2580.
- Fernandes, J., & Putri, S. (2022). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA 19 KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 198-209.
- Heryanti, C. D., Wahidahwati, W., & Suryono, B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(8).

- Ishlah, M. F., & Kurniawan, D. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi. *JEBISKU: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus*, 1(2), 42-55.
- Lestari, R. Y., Ridwan, M., & Batubara, M. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2815-2825.
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah. *JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research)*, 5(2), 390-399.
- Mahmudi, A. (2016). Akuntansi Sektor Publik.
- Manafe, H. A., Niha, S. S., & Putra, D. P. S. (2023). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(3), 541-547.
- Melmambessy, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura Ditinjau Dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal Dan Efektivitas. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 10-15.
- Nasir, Yuslinaini, A. Hamid, Yusuf, Z., & Zakaria. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Banda Aceh. *Jurnal EMT KITA*, 7(3), 676–683.
- Niswani, N., & Firdaus, R. (2022). Pengaruh belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(1), 64-77.
- Nauw, E. T., & Riharjo, I. B. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(6).
- Padang, N. N., & Padang, W. S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan

- Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 303-318.
- Permatasari, D. A., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengaruh kemandirian, efektifitas pendapatan asli daerah dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1573.
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DANA KEISTIMEWAAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 28(1), 89-105.
- Riswati, R., & Bukhori, Y. (2023). Analisis Rasio Keserasian Belanja Modal dan Operasional Serta Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Kota Bandung. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 10(1), 41-55.
- Sari, N., Nainggolan, B. R. M., Purba, R. A., Saragih, T. B., & Banjarnahor, W. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 4(1), 219-223.
- Wahyudin, I. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 86-97.
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Deepublish.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896-2910.

LAMPIRAN

Lampiran 1 – Data Penelitian

No.	Kabupaten /Kota	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal	Dana Perimbangan	Kinerja Keuangan	Keterangan
1	Kabupaten Bangkalan	2017	325,525,663,295.62	296,055,032,740.89	1,425,478,980,467.00	107%	Sangat Efektif
2	Kabupaten Bangkalan	2018	199,258,427,616.41	324,705,615,061.02	1,344,825,042,010.00	88%	Kurang Efektif
3	Kabupaten Bangkalan	2019	262,258,214,631.49	420,929,339,410.27	1,463,559,120,412.00	107%	Sangat Efektif
4	Kabupaten Bangkalan	2020	233,177,792,497.49	177,101,047,200.71	1,314,106,777,010.00	110%	Sangat Efektif
5	Kabupaten Bangkalan	2021	271,656,642,591.09	226,715,282,463.00	1,360,545,328,033.00	134%	Sangat Efektif
6	Kabupaten Banyuwangi	2017	388,943,532,860.79	657,077,214,259.81	1,793,664,689,557.00	85%	Kurang Efektif
7	Kabupaten Banyuwangi	2018	450,066,949,215.18	480,382,663,298.36	1,960,992,382,687.00	72%	Tidak Efektif
8	Kabupaten Banyuwangi	2019	495,691,172,682.08	529,542,999,045.89	2,005,264,847,963.00	96%	Cukup Efektif
9	Kabupaten Banyuwangi	2020	482,740,174,377.22	553,395,030,040.43	1,852,125,074,002.00	85%	Kurang Efektif
10	Kabupaten Banyuwangi	2021	520,021,954,381.20	661,103,406,609.61	1,982,325,720,387.00	103%	Sangat Efektif
11	Kota Batu	2017	149,423,863,144.26	142,582,638,440.00	700,019,842,618.00	102%	Sangat Efektif
12	Kota Batu	2018	162,574,646,582.18	125,401,338,967.88	807,810,760,869.00	18%	Tidak Efektif
13	Kota Batu	2019	183,717,261,619.50	143,072,144,864.74	786,961,111,369.00	115%	Sangat Efektif
14	Kota Batu	2020	136,766,373,974.97	94,063,915,966.61	732,316,780,356.00	123%	Sangat Efektif
15	Kota Batu	2021	147,007,052,561.30	131,194,504,247.65	804,342,808,810.00	102%	Sangat Efektif
16	Kabupaten Blitar	2017	322,878,943,149.35	593,444,438,951.50	1,543,625,115,315.00	103%	Sangat Efektif
17	Kabupaten Blitar	2018	252,453,245,801.27	409,773,750,053.41	1,599,499,305,169.00	108%	Sangat Efektif
18	Kabupaten Blitar	2019	285,742,715,698.86	518,398,600,299.86	1,622,294,376,590.00	109%	Sangat Efektif
19	Kabupaten Blitar	2020	302,540,062,676.13	271,999,153,804.09	1,469,898,940,288.00	122%	Sangat Efektif
20	Kabupaten Blitar	2021	407,530,973,690.43	359,930,998,439.11	1,519,757,917,552.00	129%	Sangat Efektif
21	Kabupaten Bojonegoro	2017	448,188,138,725.43	573,456,669,153.80	1,840,662,906,127.00	102%	Sangat Efektif
22	Kabupaten Bojonegoro	2018	425,167,970,431.02	601,338,047,080.92	3,814,660,800,562.00	114%	Sangat Efektif
23	Kabupaten Bojonegoro	2019	561,251,499,955.96	1,304,758,303,126.38	3,522,411,681,988.00	106%	Sangat Efektif
24	Kabupaten Bojonegoro	2020	720,914,033,084.25	1,392,814,495,385.95	2,754,943,427,535.00	127%	Sangat Efektif
25	Kabupaten Bojonegoro	2021	955,640,728,380.39	1,619,932,427,856.10	4,190,666,246,429.00	105%	Sangat Efektif
26	Kabupaten Bondowoso	2017	229,151,109,430.64	383,574,373,763.00	1,311,071,739,391.00	100%	Efektif

No.	Kabupaten /Kota	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal	Dana Perimbangan	Kinerja Keuangan	Keterangan
27	Kabupaten Bondowoso	2018	203,239,207,718.18	284,801,344,676.10	1,336,039,553,661.00	106%	Sangat Efektif
28	Kabupaten Bondowoso	2019	218,538,009,619.15	385,555,647,206.64	1,433,245,361,106.00	104%	Sangat Efektif
29	Kabupaten Bondowoso	2020	222,657,296,673.72	227,251,278,052.52	1,264,055,581,233.00	107%	Sangat Efektif
30	Kabupaten Bondowoso	2021	223,136,567,608.59	196,554,645,695.81	1,323,758,092,095.00	105%	Sangat Efektif
31	Kabupaten Gresik	2017	871,564,498,248.20	422,641,766,003.06	1,324,731,018,270.00	96%	Cukup Efektif
32	Kabupaten Gresik	2018	957,255,706,268.71	369,883,330,557.33	1,425,168,417,026.00	104%	Sangat Efektif
33	Kabupaten Gresik	2019	980,776,381,995.43	538,046,525,562.34	1,467,854,957,330.00	106%	Sangat Efektif
34	Kabupaten Gresik	2020	924,657,913,563.00	281,697,688,881.60	1,331,644,546,291.00	113%	Sangat Efektif
35	Kabupaten Gresik	2021	1,031,387,734,236.41	298,579,850,432.56	1,388,743,965,408.00	89%	Kurang Efektif
36	Kabupaten Jember	2017	719,213,581,070.78	708,870,975,184.01	2,309,229,753,650.00	98%	Cukup Efektif
37	Kabupaten Jember	2018	597,509,388,023.37	632,247,571,649.24	2,347,407,698,706.00	98%	Cukup Efektif
38	Kabupaten Jember	2019	667,598,426,909.96	731,597,027,829.73	2,402,647,387,288.00	101%	Sangat Efektif
39	Kabupaten Jember	2020	593,175,154,485.65	188,310,951,430.71	2,208,327,873,867.00	90%	Cukup Efektif
40	Kabupaten Jember	2021	635,305,965,623.24	552,082,443,567.66	2,205,490,834,217.00	88%	Tidak Efektif
41	Kabupaten Jombang	2017	521,236,583,750.17	387,322,559,622.16	1,486,041,199,349.00	105%	Sangat Efektif
42	Kabupaten Jombang	2018	438,197,175,438.60	293,715,521,337.31	1,559,258,761,514.00	103%	Sangat Efektif
43	Kabupaten Jombang	2019	476,662,933,476.46	374,841,005,379.55	1,571,391,531,751.00	108%	Sangat Efektif
44	Kabupaten Jombang	2020	468,627,918,703.89	243,636,238,818.22	1,465,246,900,235.00	111%	Sangat Efektif
45	Kabupaten Jombang	2021	665,844,012,375.24	372,351,774,099.91	1,510,656,256,873.00	141%	Sangat Efektif
46	Kabupaten Kediri	2017	533,985,244,135.13	675,279,276,055.25	1,683,437,725,657.00	119%	Sangat Efektif
47	Kabupaten Kediri	2018	476,905,008,817.62	547,123,553,524.19	1,769,048,284,685.00	198%	Sangat Efektif
48	Kabupaten Kediri	2019	457,763,422,281.57	577,461,193,639.18	1,811,330,768,330.00	113%	Sangat Efektif
49	Kabupaten Kediri	2020	494,413,404,880.18	400,753,335,360.14	1,660,449,065,562.00	113%	Sangat Efektif
50	Kabupaten Kediri	2021	513,773,026,141.24	319,312,867,444.77	1,781,942,316,819.00	113%	Sangat Efektif
51	Kabupaten Lamongan	2017	429,200,063,876.82	505,221,589,585	1,594,776,221,094.00	98%	Cukup Efektif
52	Kabupaten Lamongan	2018	436,595,179,671.02	531,811,348,158.04	1,700,714,352,575.00	88%	Kurang Efektif
53	Kabupaten Lamongan	2019	472,002,823,163.86	490,432,716,464.10	1,669,265,105,739.00	91%	Cukup Efektif
54	Kabupaten Lamongan	2020	481,752,331,399.49	325,359,777,833.41	1,542,723,757,256.00	100%	Efektif
55	Kabupaten Lamongan	2021	604,587,635,067.78	327,391,789,305.79	1,637,147,692,887.00	126%	Sangat Efektif

No.	Kabupaten /Kota	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal	Dana Perimbangan	Kinerja Keuangan	Keterangan
56	Kabupaten Lumajang	2017	324,253,671,099.01	258,258,151,004.00	1,317,925,709,276.00	96%	Cukup Efektif
57	Kabupaten Lumajang	2018	270,139,870,884.23	288,428,035,220.96	1,390,713,615,483.00	96%	Cukup Efektif
58	Kabupaten Lumajang	2019	296,467,374,174.37	247,326,031,850.58	1,409,112,910,571.00	94%	Cukup Efektif
59	Kabupaten Lumajang	2020	300,263,112,642.77	198,145,592,481.26	1,271,212,220,474	107%	Sangat Efektif
60	Kabupaten Lumajang	2021	325,045,892,762.36	211,211,038,105.98	1,290,927,288,514.00	107%	Sangat Efektif
61	Kabupaten Madiun	2017	241,944,162,780.13	374,316,928,089.82	1,180,876,436,337.00	100%	Cukup Efektif
62	Kabupaten Madiun	2018	219,041,431,266.71	291,642,038,611.80	1,286,346,821,945.00	103%	Sangat Efektif
63	Kabupaten Madiun	2019	229,206,394,170.37	357,952,659,653.67	1,305,223,591,072.00	110%	Sangat Efektif
64	Kabupaten Madiun	2020	258,211,505,535.08	254,429,829,266.14	1,174,980,529,263.00	120%	Sangat Efektif
65	Kabupaten Madiun	2021	333,154,568,459.37	183,413,874,591.70	1,256,826,955,632.00	105%	Sangat Efektif
66	Kabupaten Magetan	2017	212,806,288,638.89	201,215,680,487.00	1,243,820,501,734.00	110%	Sangat Efektif
67	Kabupaten Magetan	2018	196,826,063,935.96	194,944,111,688.41	1,280,133,487,395.00	115%	Sangat Efektif
68	Kabupaten Magetan	2019	237,377,706,041.60	349,500,872,689.75	1,303,480,933,039.00	112%	Sangat Efektif
69	Kabupaten Magetan	2020	203,465,853,559.25	237,214,475,379.53	1,201,678,801,723.00	99%	Cukup Efektif
70	Kabupaten Magetan	2021	243,732,143,559.50	157,745,505,910.10	1,434,437,329,412.00	117%	Sangat Efektif
71	Kabupaten Malang	2017	743,313,499,675.19	740,344,342,432.81	2,299,979,677,583.00	114%	Sangat Efektif
72	Kabupaten Malang	2018	585,290,988,835.99	718,439,018,703.30	2,413,067,750,143.00	109%	Sangat Efektif
73	Kabupaten Malang	2019	623,808,877,784.41	808,653,391,279.27	2,492,578,744,298.00	104%	Sangat Efektif
74	Kabupaten Malang	2020	583,864,309,201.31	563,771,007,581.01	2,205,934,268,183.00	114%	Sangat Efektif
75	Kabupaten Malang	2021	669,361,940,836.91	439,410,242,136.50	2,293,906,074,127.00	90%	Cukup Efektif
76	Kabupaten Mojokerto	2017	500,518,075,940.25	576,646,344,208.06	1,343,618,935,383.00	112%	Sangat Efektif
77	Kabupaten Mojokerto	2018	546,289,352,326.15	554,143,666,840	1,427,268,109,599.00	113%	Sangat Efektif
78	Kabupaten Mojokerto	2019	554,999,510,278.91	544,686,738,755.79	1,429,707,199,255.00	108%	Sangat Efektif
79	Kabupaten Mojokerto	2020	537,297,509,364.79	302,408,774,473.42	1,284,216,322,355.00	113%	Sangat Efektif
80	Kabupaten Mojokerto	2021	625,418,916,520.09	299,815,498,723.11	1,346,222,555,562.00	116%	Sangat Efektif
81	Kabupaten Nganjuk	2017	332,495,541,835.18	319,990,242,920.71	1,503,523,174,920.00	101%	Sangat Efektif
82	Kabupaten Nganjuk	2018	361,586,738,454.12	339,783,946,854.77	1,529,562,444,177.00	105%	Sangat Efektif
83	Kabupaten Nganjuk	2019	368,272,236,478.28	435,247,383,922.15	1,556,827,334,981.00	103%	Sangat Efektif
84	Kabupaten Nganjuk	2020	402,347,144,361.43	249,630,540,424.49	1,441,047,387,801.00	124%	Sangat Efektif

No.	Kabupaten /Kota	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal	Dana Perimbangan	Kinerja Keuangan	Keterangan
85	Kabupaten Nganjuk	2021	478,462,299,146.24	351,676,609,668.26	1,486,994,028,900.00	133%	Sangat Efektif
86	Kabupaten Ngawi	2017	275,721,180,047.46	379,215,035,737.85	1,408,235,808,936.00	110%	Sangat Efektif
87	Kabupaten Ngawi	2018	223,871,715,122.25	307,436,987,486.72	1,486,134,020,027.00	109%	Sangat Efektif
88	Kabupaten Ngawi	2019	255,080,331,088.80	362,913,803,410.72	1,501,826,035,037.00	110%	Sangat Efektif
89	Kabupaten Ngawi	2020	269,979,788,588.80	281,006,234,646.10	1,394,716,660,633.00	116%	Sangat Efektif
90	Kabupaten Ngawi	2021	283,608,932,666.80	257,951,168,618.07	1,471,331,470,197.00	99%	Cukup Efektif
91	Kabupaten Pacitan	2017	202,090,671,761.19	346,602,302,143.00	1,081,180,109,317.00	106%	Sangat Efektif
92	Kabupaten Pacitan	2018	185,153,427,758.47	271,920,244,653.80	1,170,405,463,618.00	112%	Sangat Efektif
93	Kabupaten Pacitan	2019	199,044,387,517.51	372,064,484,883.52	1,045,809,355,927.00	100%	Cukup Efektif
94	Kabupaten Pacitan	2020	168,459,638,378.38	140,058,487,669.00	1,106,069,120,350.00	110%	Sangat Efektif
95	Kabupaten Pacitan	2021	211,689,109,365.52	174,928,799,770.00	1,130,204,605,402.00	150%	Sangat Efektif
96	Kabupaten Pamekasan	2017	243,311,843,020.28	372,031,422,731.73	1,337,421,843,722.00	110%	Sangat Efektif
97	Kabupaten Pamekasan	2018	222,410,664,049.09	317,340,696,505.83	1,252,406,756,553.00	124%	Sangat Efektif
98	Kabupaten Pamekasan	2019	219,671,437,717.13	399,606,369,876.00	1,297,089,273,637.00	123%	Sangat Efektif
99	Kabupaten Pamekasan	2020	232,262,477,004.71	462,851,108,600.38	1,178,649,523,958.00	127%	Sangat Efektif
100	Kabupaten Pamekasan	2021	205,969,039,947.27	319,197,803,841.74	1,239,252,236,584.00	100%	Cukup Efektif
101	Kabupaten Pasuruan	2017	759,945,807,967.66	492,094,079,745.17	2,080,303,031,668.00	107%	Sangat Efektif
102	Kabupaten Pasuruan	2018	614,302,515,368.07	447,987,653,723.00	2,185,098,553,219.00	103%	Sangat Efektif
103	Kabupaten Pasuruan	2019	650,889,114,689.79	447,027,934,716.49	2,307,091,406,493.00	95%	Cukup Efektif
104	Kabupaten Pasuruan	2020	700,151,909,602.40	352,127,050,135.28	1,755,653,880,426.00	106%	Sangat Efektif
105	Kabupaten Pasuruan	2021	701,199,341,703.47	376,073,722,205.00	1,757,730,596,726.00	105%	Sangat Efektif
106	Kabupaten Ponorogo	2017	308,232,104,639.07	465,255,813,618.53	1,433,075,787,760.00	100%	Efektif
107	Kabupaten Ponorogo	2018	289,017,741,958.47	403,302,695,098.47	1,552,016,044,423.00	112%	Sangat Efektif
108	Kabupaten Ponorogo	2019	245,431,703,862.63	357,931,010,622.97	1,474,871,521,892.00	85%	Kurang Efektif
109	Kabupaten Ponorogo	2020	254,884,191,561.70	254,602,152,790.75	1,375,815,571,772.00	95%	Cukup Efektif
110	Kabupaten Ponorogo	2021	376,702,757,475.31	225,031,272,650.61	1,427,372,717,647.00	137%	Sangat Efektif
111	Kabupaten Probolinggo	2017	302,046,061,275.70	326,769,685,303.85	1,345,461,046,956.00	97%	Cukup Efektif
112	Kabupaten Probolinggo	2018	234,483,636,962.64	242,838,333,931.05	1,395,763,926,032.00	99%	Cukup Efektif
113	Kabupaten Probolinggo	2019	245,431,703,862.63	357,931,010,622.97	1,474,871,521,892.00	100%	Cukup Efektif

No.	Kabupaten /Kota	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal	Dana Perimbangan	Kinerja Keuangan	Keterangan
114	Kabupaten Probolinggo	2020	254,884,191,561.70	254,602,152,790.75	1,375,815,571,772.00	101%	Sangat Efektif
115	Kabupaten Probolinggo	2021	300,398,775,730.94	175,518,233,417.06	1,390,967,193,110.00	108%	Sangat Efektif
116	Kabupaten Sampang	2017	207,448,445,816.75	374,875,770,149.46	1,104,228,648,147.00	98%	Cukup Efektif
117	Kabupaten Sampang	2018	135,349,867,861.19	312,582,844,308.00	1,212,116,500,870.00	98%	Cukup Efektif
118	Kabupaten Sampang	2019	168,778,440,667.02	1,257,785,091,729.00	1,257,785,091,729.00	104%	Sangat Efektif
119	Kabupaten Sampang	2020	175,518,944,949.09	295,428,215,585.00	1,126,475,028,707.00	98%	Cukup Efektif
120	Kabupaten Sampang	2021	135,499,437,439.15	320,956,306,624.00	1,173,612,142,880.00	100%	Efektif
121	Kabupaten Sidoarjo	2017	1,557,772,194,420.59	565,233,558,275.41	1,708,887,132,594.00	100%	Efektif
122	Kabupaten Sidoarjo	2018	1,685,558,668,147.01	810,565,148,332.58	1,793,474,341,790.00	113%	Sangat Efektif
123	Kabupaten Sidoarjo	2019	1,689,953,213,262.69	800,179,139,421.56	1,779,140,856,326.00	99%	Cukup Efektif
124	Kabupaten Sidoarjo	2020	1,798,515,529,274.65	519,252,871,399.47	1,711,271,242,511.00	117%	Sangat Efektif
125	Kabupaten Sidoarjo	2021	1,921,244,253,335.69	919,012,883,755.00	1,716,490,317,781.00	112%	Sangat Efektif
126	Kota Surabaya	2017	5,161,844,571,171.67	2,517,891,658,246.41	1,965,635,624,698.00	110%	Sangat Efektif
127	Kota Surabaya	2018	4,973,031,004,727.10	2,088,869,968,843.00	2,430,061,039,309.45	113%	Sangat Efektif
128	Kota Surabaya	2019	5,381,920,253,809.67	2,754,304,824,082.00	2,001,327,643,447.00	103%	Sangat Efektif
129	Kota Surabaya	2020	4,289,960,292,372.98	1,583,663,159,605.00	2,045,481,662,469.00	85%	Kurang Efektif
130	Kota Surabaya	2021	4,727,280,629,669.69	1,016,336,503,390.00	2,154,338,429,336.00	89%	Kurang Efektif
131	Kabupaten Situbondo	2017	228,523,663,374.13	345,382,416,017.98	1,091,000,194,656.00	108%	Sangat Efektif
132	Kabupaten Situbondo	2018	187,287,219,449.41	398,444,375,446.97	1,227,769,851,587.00	105%	Sangat Efektif
133	Kabupaten Situbondo	2019	204,727,875,621.05	354,702,115,633.22	1,224,410,192,664.00	108%	Sangat Efektif
134	Kabupaten Situbondo	2020	218,845,065,632.84	237,667,540,138.58	1,124,819,473,131.00	112%	Sangat Efektif
135	Kabupaten Situbondo	2021	228,766,562,733.20	217,518,026,645.23	1,143,019,587,549.00	114%	Sangat Efektif
136	Kabupaten Sumenep	2017	190,750,065,358.68	291,884,664,570.86	1,505,652,308,070.00	97%	Cukup Efektif
137	Kabupaten Sumenep	2018	185,832,755,753.29	353,711,734,988.55	1,601,302,418,621.00	82%	Kurang Efektif
138	Kabupaten Sumenep	2019	246,421,640,622.62	367,279,731,555.16	1,645,545,460,462.00	96%	Cukup Efektif
139	Kabupaten Sumenep	2020	260,329,014,333.57	373,682,754,885.44	1,487,090,215,701.00	108%	Sangat Efektif
140	Kabupaten Sumenep	2021	252,690,773,879.35	276,613,588,440.79	1,564,471,304,262.00	111%	Sangat Efektif
141	Kabupaten Trenggalek	2017	253,224,852,674.12	352,598,950,701.03	181,671,057,600.00	103%	Sangat Efektif
142	Kabupaten Trenggalek	2018	233,808,792,639.21	311,421,059,014.92	144,606,280,000.00	106%	Sangat Efektif

No.	Kabupaten /Kota	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal	Dana Perimbangan	Kinerja Keuangan	Keterangan
143	Kabupaten Trenggalek	2019	285,134,071,594.78	407,775,819,287.93	1,315,922,498,806.00	95%	Cukup Efektif
144	Kabupaten Trenggalek	2020	257,977,450,483.90	231,313,877,678.23	1,205,353,056,184.00	101%	Sangat Efektif
145	Kabupaten Trenggalek	2021	233,490,679,200.57	238,767,153,102.56	1,222,481,059,391.00	91%	Cukup Efektif
146	Kabupaten Tuban	2017	497,223,807,932.43	497,409,334,514.91	1,418,244,471,704.00	107%	Sangat Efektif
147	Kabupaten Tuban	2018	442,531,646,743.74	494,963,683,321.90	1,493,217,733,407.00	106%	Sangat Efektif
148	Kabupaten Tuban	2019	518,003,562,562.47	474,259,825,168.00	1,529,633,733,214.00	119%	Sangat Efektif
149	Kabupaten Tuban	2020	566,077,757,668.16	309,230,413,251.33	1,409,012,104,780.00	116%	Sangat Efektif
150	Kabupaten Tuban	2021	614,733,285,905.09	384,854,856,650.27	1,441,624,984,537.00	133%	Sangat Efektif
151	Kabupaten Tulungagung	2017	503,103,394,882.52	395,842,837,980.29	1,594,108,897,063.00	116%	Sangat Efektif
152	Kabupaten Tulungagung	2018	453,153,465,280.26	370,661,902,571.09	1,701,678,499,757.00	110%	Sangat Efektif
153	Kabupaten Tulungagung	2019	486,358,101,284.37	247,730,648,459.57	1,682,327,890,010.00	109%	Sangat Efektif
154	Kabupaten Tulungagung	2020	510,549,330,895.05	246,376,998,498.80	1,557,961,745,035.00	118%	Sangat Efektif
155	Kabupaten Tulungagung	2021	953,892,026,423.44	288,291,855,548.78	1,552,801,795,880.00	165%	Sangat Efektif

Lampiran 2 – Perhitungan Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Efektivitas

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Target Pendapatan Asli Daerah	Kinerja Keuangan	Keterangan
1	Kabupaten Bangkalan	2017	325,525,663,295.62	303,497,493,139.14	107%	Sangat Efektif
2	Kabupaten Bangkalan	2018	199,258,427,616.41	225,239,028,383.40	88%	Kurang Efektif
3	Kabupaten Bangkalan	2019	262,258,214,631.49	244,180,072,574.56	107%	Sangat Efektif
4	Kabupaten Bangkalan	2020	233,177,792,497.49	211,620,744,167.24	110%	Sangat Efektif
5	Kabupaten Bangkalan	2021	271,656,642,591.09	202,795,570,271.00	134%	Sangat Efektif
6	Kabupaten Banyuwangi	2017	388,943,532,860.79	460,001,533,716.00	85%	Kurang Efektif
7	Kabupaten Banyuwangi	2018	450,066,949,215.18	624,174,973,802.82	72%	Tidak Efektif
8	Kabupaten Banyuwangi	2019	495,691,172,682.08	517,576,991,597.46	96%	Cukup Efektif
9	Kabupaten Banyuwangi	2020	482,740,174,377.22	565,194,392,512.52	85%	Kurang Efektif
10	Kabupaten Banyuwangi	2021	520,021,954,381.20	505,891,075,188.26	103%	Sangat Efektif
11	Kota Batu	2017	149,423,863,144.26	145,865,571,206.69	102%	Sangat Efektif
12	Kota Batu	2018	162,574,646,582.18	928,000,607,523.39	18%	Tidak Efektif
13	Kota Batu	2019	183,717,261,619.50	160,391,145,019.00	115%	Sangat Efektif
14	Kota Batu	2020	136,766,373,974.97	110,947,791,067.00	123%	Sangat Efektif
15	Kota Batu	2021	147,007,052,561.30	143,745,182,896.31	102%	Sangat Efektif

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Target Pendapatan Asli Daerah	Kinerja Keuangan	Keterangan
16	Kabupaten Blitar	2017	322,878,943,149.35	314,340,556,529.00	103%	Sangat Efektif
17	Kabupaten Blitar	2018	252,453,245,801.27	233,971,892,347.51	108%	Sangat Efektif
18	Kabupaten Blitar	2019	285,742,715,698.86	261,661,013,813.05	109%	Sangat Efektif
19	Kabupaten Blitar	2020	302,540,062,676.13	248,571,388,234.59	122%	Sangat Efektif
20	Kabupaten Blitar	2021	407,530,973,690.43	314,832,381,947.12	129%	Sangat Efektif
21	Kabupaten Bojonegoro	2017	448,188,138,725.43	437,700,601,245.36	102%	Sangat Efektif
22	Kabupaten Bojonegoro	2018	425,167,970,431.02	374,561,070,778.81	114%	Sangat Efektif
23	Kabupaten Bojonegoro	2019	561,251,499,955.96	530,436,101,233.74	106%	Sangat Efektif
24	Kabupaten Bojonegoro	2020	720,914,033,084.25	568,571,571,749.33	127%	Sangat Efektif
25	Kabupaten Bojonegoro	2021	955,640,728,380.39	912,984,095,584.00	105%	Sangat Efektif
26	Kabupaten Bondowoso	2017	229,151,109,430.64	229,440,921,239.84	100%	Efektif
27	Kabupaten Bondowoso	2018	203,239,207,718.18	191,969,726,243.71	106%	Sangat Efektif
28	Kabupaten Bondowoso	2019	218,538,009,619.15	211,134,843,997.57	104%	Sangat Efektif
29	Kabupaten Bondowoso	2020	222,657,296,673.72	208,920,484,210.00	107%	Sangat Efektif
30	Kabupaten Bondowoso	2021	223,136,567,608.59	212,787,209,962.00	105%	Sangat Efektif
31	Kabupaten Gresik	2017	871,564,498,248.20	910,630,160,210.27	96%	Cukup Efektif
32	Kabupaten Gresik	2018	957,255,706,268.71	921,926,953,257.00	104%	Sangat Efektif
33	Kabupaten Gresik	2019	980,776,381,995.43	923,973,075,519.70	106%	Sangat Efektif
34	Kabupaten Gresik	2020	924,657,913,563.00	816,210,832,745.35	113%	Sangat Efektif
35	Kabupaten Gresik	2021	1,031,387,734,236.41	1,153,264,477,750.00	89%	Kurang Efektif
36	Kabupaten Jember	2017	719,213,581,070.78	736,927,109,103.11	98%	Cukup Efektif
37	Kabupaten Jember	2018	597,509,388,023.37	609,304,818,610.50	98%	Cukup Efektif
38	Kabupaten Jember	2019	667,598,426,909.96	662,481,418,206.46	101%	Sangat Efektif
39	Kabupaten Jember	2020	593,175,154,485.65	660,367,999,055.62	90%	Cukup Efektif
40	Kabupaten Jember	2021	635,305,965,623.24	719,879,915,600.00	88%	Tidak Efektif
41	Kabupaten Jombang	2017	521,236,583,750.17	496,029,660,251.68	105%	Sangat Efektif
42	Kabupaten Jombang	2018	438,197,175,438.60	427,379,057,690.85	103%	Sangat Efektif
43	Kabupaten Jombang	2019	476,662,933,476.46	443,060,153,764.39	108%	Sangat Efektif
44	Kabupaten Jombang	2020	468,627,918,703.89	420,900,051,055.05	111%	Sangat Efektif
45	Kabupaten Jombang	2021	665,844,012,375.24	470,650,315,687.00	141%	Sangat Efektif
46	Kabupaten Kediri	2017	533,985,244,135.13	447,293,983,259.67	119%	Sangat Efektif
47	Kabupaten Kediri	2018	476,905,008,817.62	241,268,069,987.86	198%	Sangat Efektif
48	Kabupaten Kediri	2019	457,763,422,281.57	405,462,806,475.07	113%	Sangat Efektif
49	Kabupaten Kediri	2020	494,413,404,880.18	436,238,308,520.74	113%	Sangat Efektif
50	Kabupaten Kediri	2021	513,773,026,141.24	456,360,001,365.60	113%	Sangat Efektif
51	Kabupaten Lamongan	2017	429,200,063,876.82	436,519,037,265.60	98%	Cukup Efektif
52	Kabupaten Lamongan	2018	436,595,179,671.02	495,857,330,740.00	88%	Kurang Efektif
53	Kabupaten Lamongan	2019	472,002,823,163.86	517,168,711,905.00	91%	Cukup Efektif

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Target Pendapatan Asli Daerah	Kinerja Keuangan	Keterangan
54	Kabupaten Lamongan	2020	481,752,331,399.49	483,583,044,116.57	100%	Efektif
55	Kabupaten Lamongan	2021	604,587,635,067.78	477,998,311,040.00	126%	Sangat Efektif
56	Kabupaten Lumajang	2017	324,253,671,099.01	339,157,371,000.00	96%	Cukup Efektif
57	Kabupaten Lumajang	2018	270,139,870,884.23	282,484,709,562.30	96%	Cukup Efektif
58	Kabupaten Lumajang	2019	296,467,374,174.37	316,538,321,171.60	94%	Cukup Efektif
59	Kabupaten Lumajang	2020	300,263,112,642.77	280,977,944,540.86	107%	Sangat Efektif
60	Kabupaten Lumajang	2021	325,045,892,762.36	304,209,601,165.00	107%	Sangat Efektif
61	Kabupaten Madiun	2017	241,944,162,780.13	242,926,538,379.92	100%	Cukup Efektif
62	Kabupaten Madiun	2018	219,041,431,266.71	211,675,179,290.80	103%	Sangat Efektif
63	Kabupaten Madiun	2019	229,206,394,170.37	209,130,880,908.84	110%	Sangat Efektif
64	Kabupaten Madiun	2020	258,211,505,535.08	215,747,202,320.52	120%	Sangat Efektif
65	Kabupaten Madiun	2021	333,154,568,459.37	318,464,845,137.00	105%	Sangat Efektif
66	Kabupaten Magetan	2017	212,806,288,638.89	193,686,220,710.00	110%	Sangat Efektif
67	Kabupaten Magetan	2018	196,826,063,935.96	171,321,160,004.00	115%	Sangat Efektif
68	Kabupaten Magetan	2019	237,377,706,041.60	212,818,519,380.40	112%	Sangat Efektif
69	Kabupaten Magetan	2020	203,465,853,559.25	205,685,936,441.40	99%	Cukup Efektif
70	Kabupaten Magetan	2021	243,732,143,559.50	207,482,716,423.00	117%	Sangat Efektif
71	Kabupaten Malang	2017	743,313,499,675.19	650,174,953,938.02	114%	Sangat Efektif
72	Kabupaten Malang	2018	585,290,988,835.99	535,084,504,055.82	109%	Sangat Efektif
73	Kabupaten Malang	2019	623,808,877,784.41	600,030,453,944.89	104%	Sangat Efektif
74	Kabupaten Malang	2020	583,864,309,201.31	509,999,102,162.35	114%	Sangat Efektif
75	Kabupaten Malang	2021	669,361,940,836.91	741,747,683,247.00	90%	Cukup Efektif
76	Kabupaten Mojokerto	2017	500,518,075,940.25	446,788,334,925.19	112%	Sangat Efektif
77	Kabupaten Mojokerto	2018	546,289,352,326.15	483,033,385,770.10	113%	Sangat Efektif
78	Kabupaten Mojokerto	2019	554,999,510,278.91	515,891,852,317.93	108%	Sangat Efektif
79	Kabupaten Mojokerto	2020	537,297,509,364.79	477,257,448,164.18	113%	Sangat Efektif
80	Kabupaten Mojokerto	2021	625,418,916,520.09	540,120,371,981.00	116%	Sangat Efektif
81	Kabupaten Nganjuk	2017	332,495,541,835.18	328,556,448,594.28	101%	Sangat Efektif
82	Kabupaten Nganjuk	2018	361,586,738,454.12	345,138,632,616.31	105%	Sangat Efektif
83	Kabupaten Nganjuk	2019	368,272,236,478.28	357,367,538,593.08	103%	Sangat Efektif
84	Kabupaten Nganjuk	2020	402,347,144,361.43	323,260,574,754.39	124%	Sangat Efektif
85	Kabupaten Nganjuk	2021	478,462,299,146.24	359,762,424,055.00	133%	Sangat Efektif
86	Kabupaten Ngawi	2017	275,721,180,047.46	251,396,928,897.24	110%	Sangat Efektif
87	Kabupaten Ngawi	2018	223,871,715,122.25	204,844,385,276.60	109%	Sangat Efektif
88	Kabupaten Ngawi	2019	255,080,331,088.80	230,928,018,267.51	110%	Sangat Efektif
89	Kabupaten Ngawi	2020	269,979,788,588.80	232,017,239,267.26	116%	Sangat Efektif
90	Kabupaten Ngawi	2021	283,608,932,666.80	287,590,074,591.00	99%	Cukup Efektif
91	Kabupaten Pacitan	2017	202,090,671,761.19	191,256,202,438.74	106%	Sangat Efektif

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Target Pendapatan Asli Daerah	Kinerja Keuangan	Keterangan
92	Kabupaten Pacitan	2018	185,153,427,758.47	165,159,478,089.00	112%	Sangat Efektif
93	Kabupaten Pacitan	2019	199,044,387,517.51	199,914,734,801.44	100%	Cukup Efektif
94	Kabupaten Pacitan	2020	168,459,638,378.38	153,458,081,130.20	110%	Sangat Efektif
95	Kabupaten Pacitan	2021	211,689,109,365.52	141,408,260,531.00	150%	Sangat Efektif
96	Kabupaten Pamekasan	2017	243,311,843,020.28	220,745,963,384.00	110%	Sangat Efektif
97	Kabupaten Pamekasan	2018	222,410,664,049.09	179,974,568,986.00	124%	Sangat Efektif
98	Kabupaten Pamekasan	2019	219,671,437,717.13	177,941,072,561.00	123%	Sangat Efektif
99	Kabupaten Pamekasan	2020	232,262,477,004.71	182,735,353,662.00	127%	Sangat Efektif
100	Kabupaten Pamekasan	2021	205,969,039,947.27	206,868,469,937.00	100%	Cukup Efektif
101	Kabupaten Pasuruan	2017	759,945,807,967.66	712,198,757,834.00	107%	Sangat Efektif
102	Kabupaten Pasuruan	2018	614,302,515,368.07	595,967,643,958.00	103%	Sangat Efektif
103	Kabupaten Pasuruan	2019	650,889,114,689.79	684,119,688,310.21	95%	Cukup Efektif
104	Kabupaten Pasuruan	2020	700,151,909,602.40	658,747,582,583.01	106%	Sangat Efektif
105	Kabupaten Pasuruan	2021	701,199,341,703.47	665,066,498,771.00	105%	Sangat Efektif
106	Kabupaten Ponorogo	2017	308,232,104,639.07	307,538,129,095.30	100%	Efektif
107	Kabupaten Ponorogo	2018	289,017,741,958.47	258,942,963,965.67	112%	Sangat Efektif
108	Kabupaten Ponorogo	2019	245,431,703,862.63	287,705,087,351.98	85%	Kurang Efektif
109	Kabupaten Ponorogo	2020	254,884,191,561.70	267,119,188,651.52	95%	Cukup Efektif
110	Kabupaten Ponorogo	2021	376,702,757,475.31	274,040,857,818.00	137%	Sangat Efektif
111	Kabupaten Probolinggo	2017	302,046,061,275.70	311,749,555,522.00	97%	Cukup Efektif
112	Kabupaten Probolinggo	2018	234,483,636,962.64	235,850,247,851.40	99%	Cukup Efektif
113	Kabupaten Probolinggo	2019	245,431,703,862.63	246,036,795,800.00	100%	Cukup Efektif
114	Kabupaten Probolinggo	2020	254,884,191,561.70	251,853,285,137.80	101%	Sangat Efektif
115	Kabupaten Probolinggo	2021	300,398,775,730.94	277,561,274,555.00	108%	Sangat Efektif
116	Kabupaten Sampang	2017	207,448,445,816.75	211,396,038,250.00	98%	Cukup Efektif
117	Kabupaten Sampang	2018	135,349,867,861.19	138,417,402,149.26	98%	Cukup Efektif
118	Kabupaten Sampang	2019	168,778,440,667.02	162,994,854,462.35	104%	Sangat Efektif
119	Kabupaten Sampang	2020	175,518,944,949.09	179,581,644,475.22	98%	Cukup Efektif
120	Kabupaten Sampang	2021	135,499,437,439.15	135,432,215,322.75	100%	Efektif
121	Kabupaten Sidoarjo	2017	1,557,772,194,420.59	1,557,772,194,420.59	100%	Efektif
122	Kabupaten Sidoarjo	2018	1,685,558,668,147.01	1,493,647,141,178.83	113%	Sangat Efektif
123	Kabupaten Sidoarjo	2019	1,689,953,213,262.69	1,708,311,077,856.00	99%	Cukup Efektif
124	Kabupaten Sidoarjo	2020	1,798,515,529,274.65	1,531,360,832,030.00	117%	Sangat Efektif
125	Kabupaten Sidoarjo	2021	1,921,244,253,335.69	1,714,484,423,345.00	112%	Sangat Efektif
126	Kota Surabaya	2017	5,161,844,571,171.67	4,709,645,546,043.00	110%	Sangat Efektif
127	Kota Surabaya	2018	4,973,031,004,727.10	4,396,287,090,225.00	113%	Sangat Efektif

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Target Pendapatan Asli Daerah	Kinerja Keuangan	Keterangan
128	Kota Surabaya	2019	5,381,920,253,809.67	5,234,687,226,266.00	103%	Sangat Efektif
129	Kota Surabaya	2020	4,289,960,292,372.98	5,035,094,239,075.00	85%	Kurang Efektif
130	Kota Surabaya	2021	4,727,280,629,669.69	5,322,810,142,550.00	89%	Kurang Efektif
131	Kabupaten Situbondo	2017	228,523,663,374.13	212,129,183,762.68	108%	Sangat Efektif
132	Kabupaten Situbondo	2018	187,287,219,449.41	178,279,865,796.90	105%	Sangat Efektif
133	Kabupaten Situbondo	2019	204,727,875,621.05	189,064,945,791.99	108%	Sangat Efektif
134	Kabupaten Situbondo	2020	218,845,065,632.84	194,961,788,930.51	112%	Sangat Efektif
135	Kabupaten Situbondo	2021	228,766,562,733.20	199,917,277,206.00	114%	Sangat Efektif
136	Kabupaten Sumenep	2017	190,750,065,358.68	196,786,697,840.00	97%	Cukup Efektif
137	Kabupaten Sumenep	2018	185,832,755,753.29	226,304,702,516.00	82%	Kurang Efektif
138	Kabupaten Sumenep	2019	246,421,640,622.62	256,795,929,652.00	96%	Cukup Efektif
139	Kabupaten Sumenep	2020	260,329,014,333.57	240,647,035,200.63	108%	Sangat Efektif
140	Kabupaten Sumenep	2021	252,690,773,879.35	228,639,171,871.00	111%	Sangat Efektif
141	Kabupaten Trenggalek	2017	253,224,852,674.12	245,040,338,042.65	103%	Sangat Efektif
142	Kabupaten Trenggalek	2018	233,808,792,639.21	220,244,865,465.47	106%	Sangat Efektif
143	Kabupaten Trenggalek	2019	285,134,071,594.78	299,160,127,721.35	95%	Cukup Efektif
144	Kabupaten Trenggalek	2020	257,977,450,483.90	256,605,158,875.64	101%	Sangat Efektif
145	Kabupaten Trenggalek	2021	233,490,679,200.57	256,928,432,907.00	91%	Cukup Efektif
146	Kabupaten Tuban	2017	497,223,807,932.43	462,826,997,687.24	107%	Sangat Efektif
147	Kabupaten Tuban	2018	442,531,646,743.74	417,268,516,865.10	106%	Sangat Efektif
148	Kabupaten Tuban	2019	518,003,562,562.47	435,498,308,692.10	119%	Sangat Efektif
149	Kabupaten Tuban	2020	566,077,757,668.16	487,123,878,139.01	116%	Sangat Efektif
150	Kabupaten Tuban	2021	614,733,285,905.09	462,306,935,575.00	133%	Sangat Efektif
151	Kabupaten Tulungagung	2017	503,103,394,882.52	432,239,324,263.00	116%	Sangat Efektif
152	Kabupaten Tulungagung	2018	453,153,465,280.26	411,955,754,691.77	110%	Sangat Efektif
153	Kabupaten Tulungagung	2019	486,358,101,284.37	446,692,297,984.88	109%	Sangat Efektif
154	Kabupaten Tulungagung	2020	510,549,330,895.05	432,455,039,428.34	118%	Sangat Efektif
155	Kabupaten Tulungagung	2021	953,892,026,423.44	578,186,643,535.00	165%	Sangat Efektif

Lampiran 3 – Data sebelum *Outlier*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		155
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.16134047
Most Extreme Differences	Absolute	.140
	Positive	.140
	Negative	-.115
Test Statistic		.140
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Lampiran 4 – Data sesudah *Outlier*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		130
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.09466011
Most Extreme Differences	Absolute	.054
	Positive	.054
	Negative	-.037
Test Statistic		.054
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

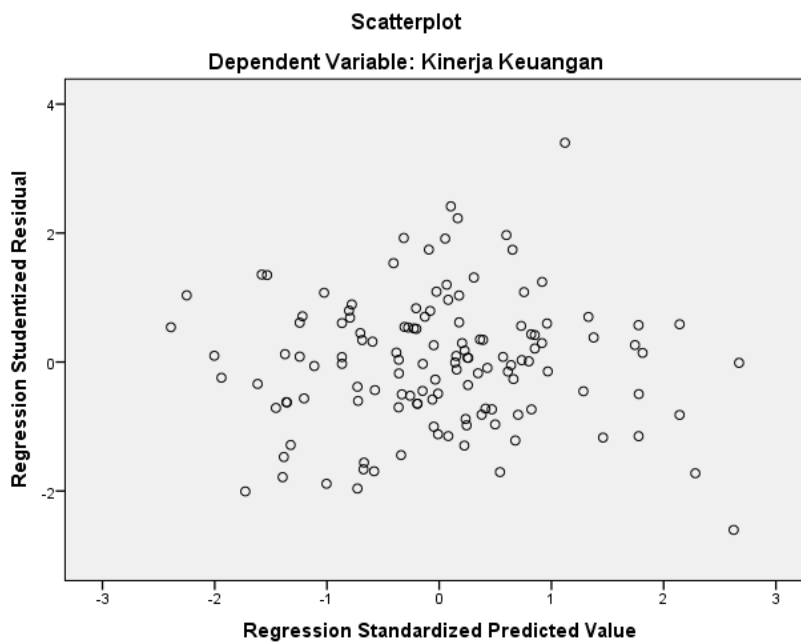
d. This is a lower bound of the true significance.

Lampiran 5 – Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pendapatan Asli Daerah	.550	1.818
Belanja Modal	.582	1.717
Dana Perimbangan	.512	1.954

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Lampiran 6 – Hasil Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 7 – Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.187 ^a	.035	.012	.09808	1.872

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Lampiran 8 – Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1(Constant)	4.479	1.305
Pendapatan Asli Daerah	.056	.020
Belanja Modal	-.022	.029
Dana Perimbangan	-.154	.061

Lampiran 9 – Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.885 ^a	.783	.778	.00981

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: KK_1

Lampiran 10 – Hasil Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Model	t	Sig.
1 (Constant)	3.431	.001
Pendapatan Asli Daerah	2.757	.007
Belanja Modal	-.761	.448
Dana Perimbangan	-2.546	.012

Lampiran 11 – Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	130	135.349.867.861	1.921.244.253.336	443.354.870.650	324.064.058.999
Belanja Modal	130	140.058.487.669	919.012.883.755	389.736.765.634	155.024.251.025
Dana Perimbangan	130	1.045.809.355.927	2.492.578.744.298	1.526.090.973.835	322.003.246.051
Kinerja Keuangan	130	.82	1.41	1.05	.098
Valid N (listwise)	130				

Lampiran 12 – Hasil Uji Normalitas P-P Plot

